

328.304
SYA
2 21

**ANALISIS PELEMBAGAAN
BADAN PERWAKILAN DESA (B P D)
DI KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK
(STUDI KASUS)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**ABDUL SYAKUR
NIM : D4E001001**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

UPT-PUSTAK-UNDIP

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
THE HEADQUARTERS OF THE
ARMY OF THE CONFEDERATE STATES
(1862-1865)

1862

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS OF THE ARMY OF THE CONFEDERATE STATES
RICHMOND, VIRGINIA



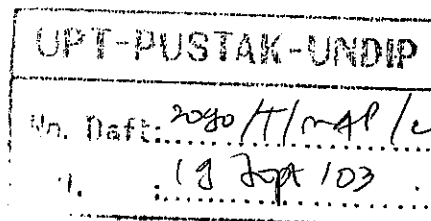
CONFEDERATE STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS OF THE ARMY OF THE CONFEDERATE STATES

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS OF THE ARMY OF THE CONFEDERATE STATES
RICHMOND, VIRGINIA
1862

RINGKASAN

Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2000 yang berfungsi sebagai lembaga legislatif yang ada di desa dan merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa. Dalam perjalanannya yang sudah 2 tahun ini BPD belum menampakkan hasil yang memuaskan, seperti kasus yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu BPD di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang sampai saat ini belum menampakkan efektifitasnya sebagai lembaga legislatif yang ada di desa. Berdasarkan fakta dan data yang peneliti kumpulkan dari lapangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum efektifnya BPD di Kecamatan Sayung, baik itu faktor dari dalam BPD itu sendiri juga faktor dari luar BPD. Hasil yang peneliti peroleh di lapangan bahwa factor yang menyebabkan belum berfungsinya pelebagaan BPD karena rendahnya sumber-sumber daya yang ada pada BPD, belum tertatanya struktur internnya, dan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga lain ke dalam lembaga BPD, sehingga fungsi-fungsi BPD tidak dapat berjalan, baik fungsi legislasinya maupun fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa. Bila kondisi ini tetap bertahan dan berkelanjutan, maka implikasinya terhadap pelebagaan BPD adalah : 1). Tujuan pembentukan BPD tidak akan tercapai, 2). Fungsi-fungsi yang ada pada BPD tidak akan berfungsi dengan baik, 3). Beban Pemerintah Desa akan semakin berat, 4). Akan menimbulkan permasalahan dan konflik-konflik baru di desa, 5). Pembangunan desa semakin tidak menentu dan tak terarah.



SECRET

and... [The following text is extremely faint and largely illegible due to low contrast and scan quality. It appears to be a multi-paragraph document.]

[Faint text at the bottom of the page, possibly a signature or reference code.]

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelebagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kecamatan Sayung, dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pelebagaan BPD di Kecamatan Sayung. Berdasarkan data dan bukti faktor yang mempengaruhi pelebagaan BPD di Kecamatan Sayung adalah sumber-sumber daya (sumber dana, SDM, dan kondisi fisik yang dimiliki BPD), struktur intern (kejelasan pembagian tugas, kewenangan, dan kesesuaian pembagian tugas) dan kaitan-kaitan yang memungkinkan (kaitan BPD dengan lembaga-lembaga lain diluar BPD). Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPD yang ada di Kecamatan Sayung yang berjumlah 20 buah, sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, yang diambil dari ketua dan satu anggota yang mewakili anggota BPD. Jenis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang digabung dengan data kualitatif, sedangkan pengujian hipotesisnya menggunakan korelasi Rank Tau Kendall's yang pengolahan datanya menggunakan program SPSS. Berdasarkan pengumpulan data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sumber-sumber daya, struktur intern dan kaitan-kaitan yang memungkinkan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, karena semua variabel independen setelah diuji dengan taraf signifikansi 5 % semuanya signifikan, bahkan pengaruhnya cukup kuat dan kuat terhadap pelebagaan Badan Perwakilan Desa sebagai variabel dependen.

Kata-kata kunci (keywords) : pelebagaan, sumber-sumber daya, struktur intern, kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*), kewenangan, dukungan, dan legislatif.

ABSTRACT

This study is to analyze the institutionalization of Badan Perwakilan Desa (BPD, Village Representatives Board) in District of Sayung and to find out the factors influencing BPD institutionalization in District of Sayung. Based on the data and evidence, the factors, which influence BPD institutionalization in District of Sayung, are the resources (fund sources, human resources, and physical conditions of BPD), internal structure (the clearance of task distribution), and enabling relations (the relationship between BPD and other institutions outside). This study took place in District of Sayung, Demak Regency, with the study population involved all 20 BPD in District of Sayung, and 40 persons sample consist of one chairperson and one member representing whole BPD members, respectively. Type and technique of data analysis used in this study are quantitative data combined to qualitative, while the hypothesis test is Rank Tau Kendall's correlation, and SPSS program is used for analysis. Based on the data collection and hypothesis test, it can be concluded that variables of resources, internal structure, and enabling relation have positive and significant effects, because all independent variables tested by 5% significance degree are significant, even the effects are fairly strong and strong to BPD institutionalization as dependent variable.

Key words: institutionalization, resources, internal structure, enabling relations, authority, support, and legislative.

ANALISIS PELEMBAGAAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK (STUDI KASUS)

Dipersiapkan dan disusun oleh

ABDUL SYAKUR

NIM : D4E001001

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal : 24 Maret 2003

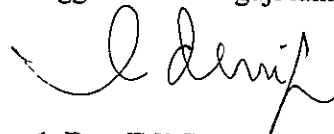
Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji / Pembimbing I



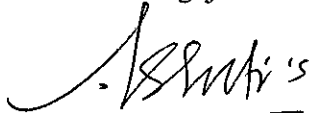
Drs. Ali Mufiz, MPA

Anggota Tim Penguji lain :



1. Drs. Edi Santoso, SU

Sekretaris Penguji / Pembimbing II



Dra. Retno Sunu Astuti, MSi



2. Dra. Dyah Hariani, MM

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister Sain.

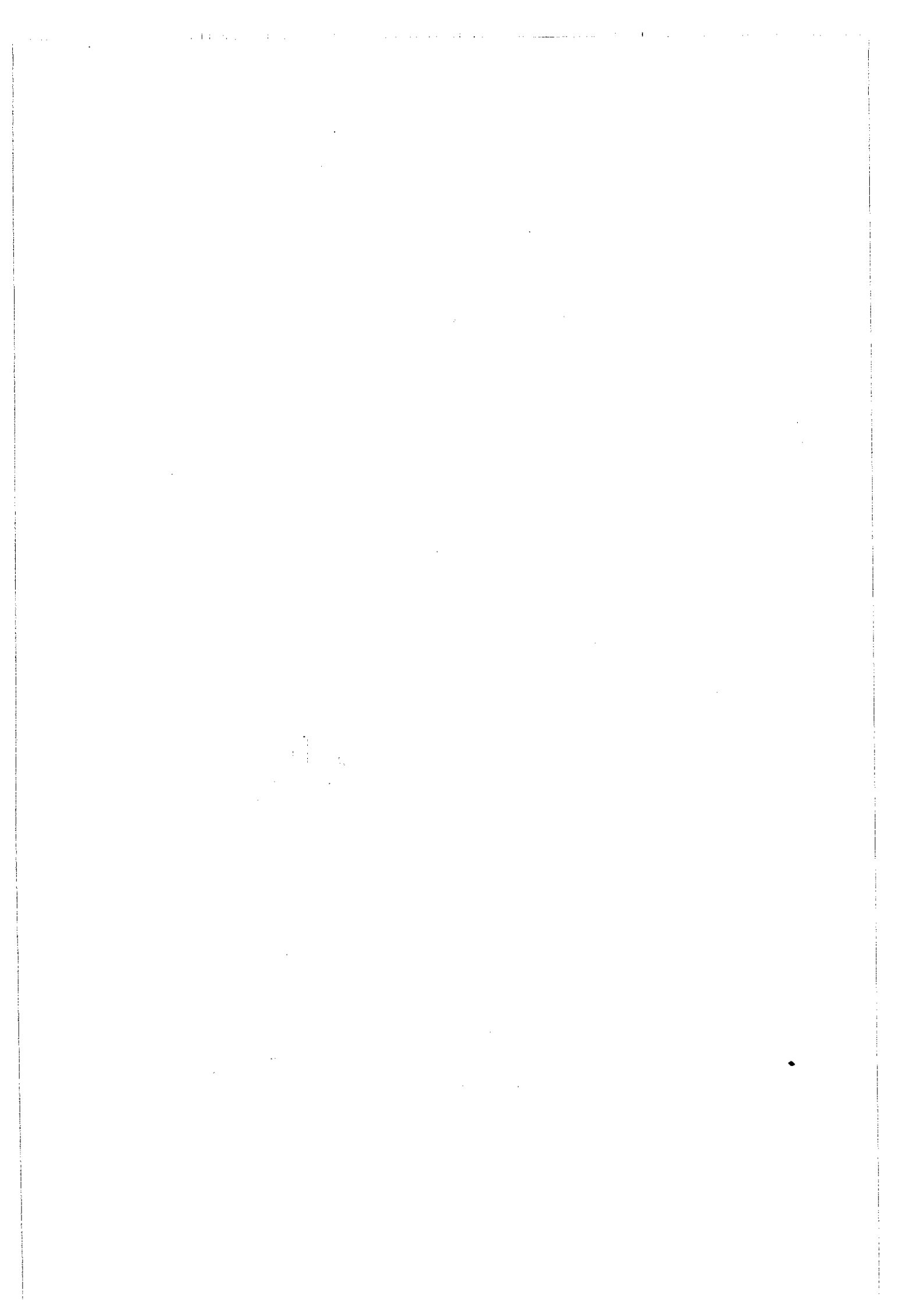
Tanggal : 24 Maret 2003

Ketua Program Studi MAP

Universitas Diponegoro Semarang




Drs. Y. WARELLA, MPA, PhD



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 24 Maret 2003



Abdul Syakur

Tanda tangan dan nama terang

DECLARATION

I, the undersigned, do hereby declare that the above is a true and correct copy of the original as shown to me by the person who produced it for my inspection and that I have not made any alteration or addition to it.

Signature of the Officer

Date

Place

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan segala Rahmat dan Hidayah-Nya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelebagaan BPD di Kecamatan Sayung, dan merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Program Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Ali Mufiz, MPA dan Ibu Dra. Retno Sunu Astuti, Msi, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan pengertian membimbing penulis ke arah penyempurnaan tesis ini.
2. Bapak Drs. Edi Santoso, SU dan Ibu Dra. Dyah Hariyani, MM, selaku penguji dalam tesis ini.
3. Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Administrasi yang telah memberikan pengetahuan dan dukungan sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
4. Seluruh dosen Magister Ilmu Administrasi Undip, yang telah memberikan pengetahuan dan petunjuk selama penulis mengikuti perkuliahan sehingga memberikan wawasan yang luas dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Camat Sayung beserta seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Ketua dan anggota BPD di Kecamatan Sayung, yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh staf administrasi dan perpustakaan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik yang telah membantu penulisan tesis ini.
8. Seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan kekuatan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Semua pihak yang secara langsung membantu penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan, pengertian, dan kesabaran yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik membangun dan saran-saran dari semua pihak sehingga hasil penelitian ini dapat lebih sempurna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i	
Ringkasan	ii	
Abstraksi	iii	
Abstract	iv	
Lembar Persetujuan	v	
Pernyataan	vi	
Kata Pengantar	vii	
Daftar Isi	ix	
Daftar Tabel	xii	
Daftar Gambar	xv	
Daftar Lampiran	xvi	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Landasan Teori	9
	1. Pelembagaan	9
	2. Sumber–Sumber Daya	20
	3. Struktur Intern	24
	4. Kaitan–Kaitan Yang Memungkinkan (<i>Enabling</i>)	28
	B. Hipotesis	37
	B.1. Hipotesis Minor	37

Table 1. Summary of the study

Year	Sample size	Study design	Study location
1998	1000	Case-control	London, UK
2000	1000	Case-control	London, UK
2002	1000	Case-control	London, UK
2004	1000	Case-control	London, UK
2006	1000	Case-control	London, UK
2008	1000	Case-control	London, UK
2010	1000	Case-control	London, UK
2012	1000	Case-control	London, UK
2014	1000	Case-control	London, UK
2016	1000	Case-control	London, UK
2018	1000	Case-control	London, UK
2020	1000	Case-control	London, UK
2022	1000	Case-control	London, UK
2024	1000	Case-control	London, UK
2026	1000	Case-control	London, UK
2028	1000	Case-control	London, UK
2030	1000	Case-control	London, UK
2032	1000	Case-control	London, UK
2034	1000	Case-control	London, UK
2036	1000	Case-control	London, UK
2038	1000	Case-control	London, UK
2040	1000	Case-control	London, UK
2042	1000	Case-control	London, UK
2044	1000	Case-control	London, UK
2046	1000	Case-control	London, UK
2048	1000	Case-control	London, UK
2050	1000	Case-control	London, UK

	B.2. Hipotesis Mayor	38
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Rancangan Penelitian	39
	B. Ruang Lingkup	39
	C. Lokasi Penelitian	40
	D. Variabel Penelitian	40
	1. Klasifikasi Variabel	40
	2. Definisi Konseptual	40
	3. Definisi Operasional	41
	E. Jenis dan Sumber Data	45
	F. Instrumen Penelitian	46
	G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	47
	H. Teknik Pengumpulan Data	48
	I. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL	
	A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	57
	A. 1. Kondisi Geografis dan Demografis	57
	A. 2. Gambaran Umum BPD Kecamatan Sayung	59
	B. Hasil Penelitian	63
	B. 1. Variabel Pelembagaan	64
	B. 2. Variabel Sumber-sumber Daya	70
	B. 3. Variabel Struktur Intern	77
	B. 4. Variabel Kaitan-kaitan Yang Memungkinkan	84
	C. Analisis Hasil Penelitian	98
	C. 1. Variabel Pelembagaan	98

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496
 1497

C. 2. Variabel Sumber-sumber Daya	99
C. 3. Variabel Struktur Intern	101
C. 4. Variabel Kaitan-kaitan Yang Memungkinkan	102
C. 5. Korelasi antara Variabel Sumber-sumber Daya dengan Pelebagaan	104
C. 6. Korelasi antara Variabel Struktur Intern dengan Pelebagaan	106
C. 7. Korelasi antara Variabel Kaitan-kaitan Yang Memungkinkan dengan Pelebagaan	108
C. 8. Pengujian Hipotesis	110
D. Diskusi	113
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
 DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
Tabel IV.1	: Nama Desa dan jumlah anggota BPD di Kec. Sayung	61
Tabel IV.2	: Jumlah anggota BPD Kecamatan Sayung dan Tingkat Pendidikan	62
Tabel IV.3	: Tingkat kemandirian BPD dalam fungsi legislasi.	64
Tabel IV.4	: Tingkat kemandirian BPD dalam fungsi pengawasan	65
Tabel IV.5	: Kemampuan dalam menyerap aspirasi	66
Tabel IV.6	: Kemampuan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat	67
Tabel IV.7	: Kemampuan BPD berhubungan dengan masyarakat desa	68
Tabel IV.8	: Dukungan masyarakat kepada BPD	68
Tabel IV.9	: Dukungan Pemerintah Daerah kepada BPD	69
Tabel IV.10	: Pemberdayaan Pemerintah Daerah kepada BPD	70
Tabel IV.11	: Dukungan pendidikan formal	71
Tabel IV.12	: Dukungan pendidikan informal	72
Tabel IV.13	: Kemampuan BPD menyusun program kerja	72
Tabel IV.14	: Kemampuan BPD merealisasikan rencana program	73
Tabel IV.15	: Jumlah dana yang dimiliki BPD	74
Tabel IV.16	: Kecukupan dana BPD untuk operasional	75
Tabel IV.17	: Kesesuaian sumberdana dengan harapan	75
Tabel IV.18	: Kualitas perlengkapan kantor BPD	76
Tabel IV.19	: Kelengkapan kantor BPD	77
Tabel IV.20	: Kejelasan pembagian kerja anggota BPD	77
Tabel IV.21	: Kesesuaian pembagian kerja	78
Tabel IV.22	: Tingkat beban pekerjaan	79
Tabel IV.23	: Tingkat keberagaman pekerjaan BPD	80

Tabel IV.24	: Tingkat kesamaan pekerjaan BPD	80
Tabel IV.25	: Kesesuaian jumlah anggota BPD	81
Tabel IV.26	: Pola hubungan BPD	82
Tabel IV.27	: Frekuensi pertemuan BPD	82
Tabel IV.28	: Kejelasan wewenang anggota BPD	83
Tabel IV.29	: Partisipasi anggota BPD dalam pengambilan keputusan	84
Tabel IV.30	: Kewenangan terhadap Lurah Desa	85
Tabel IV.31	: Kewenangan terhadap Pamong desa	86
Tabel IV.32	: Kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada Pemerintah desa	86
Tabel IV.33	: Kewenangan dalam pembuatan peraturan-peraturan Desa	87
Tabel IV.34	: Kerjasama BPD dalam Perdes	88
Tabel IV.35	: Kerja sama BPD dalam Penyusunan APBDES	89
Tabel IV.36	: Kerjasama BPD dalam perencanaan pembangunan Desa	90
Tabel IV.37	: Kerjasama BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa	90
Tabel IV.38	: Kerjasama BPD dalam menggali dan mengolah potensi desa	91
Tabel IV.39	: Keterkaitan Partai Politik dalam BPD	92
Tabel IV.40	: Tingkat sumbang saran partai politik kepada BPD	93
Tabel IV.41	: Campur tangan partai politik ke dalam BPD	93
Tabel IV.42	: Tingkat dukungan LKMD terhadap BPD	94
Tabel IV.43	: Keaktifan lembaga-lembaga lain terhadap BPD	95
Tabel IV.44	: Kerjasama antara BPD dengan lembaga keagamaan	96
Tabel IV.45	: Kerjasama antara BPD dengan organisasi kepemudaan	96
Tabel IV.46	: Kerja sama BPD dengan organisasi wanita (PKK)	97

Tabel IV.47	: Variabel Pelembagaan	98
Tabel IV.48	: Variabel Sumber-Sumberdaya	99
Tabel IV.49	: Variabel Struktur Intern	101
Tabel IV.50	: Variabel Kaitan-Kaitan yang Memungkinkan	102
Tabel IV.51	: Pengaruh antara Sumber-Sumberdaya dengan Pelembagaan	104
Tabel IV.52	: Korelasi antara sumber-sumberdaya dengan Pelembagaan BPD	105
Tabel IV.53	: Pengaruh antara Struktur Intern dengan Pelembagaan	106
Tabel IV.54	: Korelasi antara Struktur Intern dengan Pelembagaan BPD	107
Tabel IV.55	: Pengaruh antara Kaitan-kaitan yang Memungkinkan dengan Pelembagaan	108
Tabel IV.56	: Korelasi antara Kaitan-Kaitan Yang Memungkinkan dengan Pelembagaan BPD	109
Tabel IV.57	: Korelasi antara variabel sumber-sumberdaya, struktur intern, dan kaitan-kaitan yang memungkinkan dengan pelembagaan BPD	111
Tabel IV.58	: Korelasi antara sumber-sumberdaya, struktur intern dan kaitan-kaitan yang memungkinkan terhadap pelembagaan BPD	113

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Halaman
Gambar 1.1	: Bagan alur kebijakan pembentukan BPD	3
Gambar 2.2	: Model Pembangunan Lembaga dari Milton J. Esman	13
Gambar 2.3	: Variabel-variabel yang mempengaruhi Pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kecamatan Sayung	36
Gambar 2.4	: Hipotesis Minor	37
Gambar 2.5	: Hipotesis Mayor	38
Gambar 1.2	: Struktur Badan Perwakilan Desa (BPD)	63

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : KUESIONER PENELITIAN
- LAMPIRAN II : DAFTAR NAMA RESPONDEN
- LAMPIRAN III : TABEL INDUK
- LAMPIRAN IV : TOTAL VARIABEL DAN SCOR VARIABEL
- LAMPIRAN V : TABEL TUNGGAL
- LAMPIRAN VI : TABEL TUNGGAL KESIMPULAN PER VARIABEL,
CROSSTAB ANTAR VARIABEL, DAN PERHITUNGAN
STATISTIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa paradigma baru terhadap sistem ketatanegaraan kita, yaitu dari paradigma yang sentralistik ke paradigma yang desentralistik. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa kewenangan-kewenangan yang dahulu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sekarang diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten dan Kota), kecuali untuk hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, kewenangan dibidang agama, dan kewenangan strategis lainnya, seperti perencanaan nasional, pengaturan tata ruang nasional, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi.

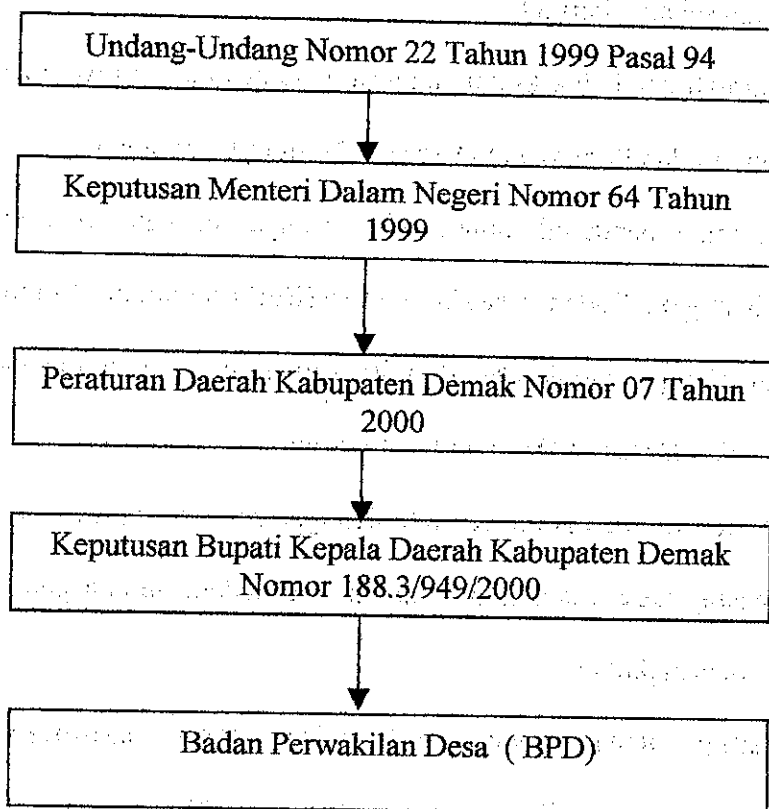
Hakikat otonomi daerah adalah efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan agar pemberian pelayanan kepada masyarakat yang semakin lama semakin baik, dan untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi.

Dikaitkan dengan Pemerintahan Desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan sejalan dengan otonomi daerah saat ini, maka upaya untuk memberdayakan (*empowering*) Pemerintahan Desa harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan. Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa telah disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mulai pasal 93 sampai dengan pasal 111, di mana pada pasal 94 disebutkan bahwa di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), yang merupakan Pemerintahan Desa. Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), yang merupakan Pemerintahan Desa.

Pengaturan mengenai desa lebih lanjut ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten (PERDA) sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan ketentuan dari Pemerintah Pusat tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000, tentang "Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD)", yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Demak Nomor 188.3/949/2000, tentang "Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD)". PERDA Nomor 07 Tahun 2000 mulai berlaku pada bulan Desember 2000, dan mulailah diadakan pemilihan Badan Perwakilan di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Demak, sehingga pada bulan Pebruari 2001 seluruh desa yang ada di Kabupaten Demak telah memiliki Badan Perwakilan Desa (BPD).

Gambar I.1. Bagan Alur Kebijakan Pembentukan BPD



Adapun tugas dan fungsi dari Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah:

- Sebagai Badan Legislasi yang ada di Desa
- Mengayomi adat istiadat Desa
- Bersama-sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa (PERDES)
- Mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa

Jumlah keanggotaan Badan Perwakilan Desa seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Kabupaten Demak Tahun 2000 adalah

disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada pada waktu pemilihan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- Bila jumlah penduduk kurang atau sama dengan 2500 jiwa, maka jumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) sejumlah 9 orang.
- Bila jumlah penduduk antara 2500 sampai dengan 3000 jiwa, maka jumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) sejumlah 11 orang.
- Bila Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, maka jumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) sejumlah 13 orang.

Sehingga dengan demikian jumlah keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) masing-masing Desa tidak sama, karena disesuaikan jumlah penduduk yang ada di Desa yang bersangkutan.

Mencermati perjalanan Badan Perwakilan Desa (BPD) khususnya yang ada di Kecamatan Sayung sejak terpilih pada bulan Pebruari 2001 hingga saat ini masih belum kelihatan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Legislasi yang ada di Desa dan bahkan terkesan belum dapat berfungsi sama sekali. Dari data yang ada di Kecamatan Sayung mengindikasikan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dari pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa :

1. Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kecamatan Sayung, yang telah terpilih sejak bulan Pebruari 2001 baru dilantik pada tanggal 31 Oktober 2001, itupun atas desakan dari para anggota BPD yang terpilih.

2. Pembekalan kepada BPD yang ada di Kecamatan Sayung baru dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah pada tanggal 10 Juni 2002.
3. Dari 20 (dua puluh) desa yang ada di Kecamatan Sayung baru 1(satu) BPD yang mempunyai dan mengirimkan Tata Tertib (Tatib) kepada Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Demak.(Data Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Demak).
4. BPD Desa Sidorejo dibubarkan oleh warga, karena dianggap tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya, karena tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat dalam pencalonan dan pengangkatan Carik Desa (Data di Kantor Kecamatan Sayung).
5. Peraturan Desa (PERDES) yang dihasilkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung sampai dengan bulan Juni 2002 baru satu, yaitu PERDES tentang penetapan APBDES, itupun sebagian BPD masih belum mengetahui tata cara pembuatan PERDES yang benar. (Data Tim Pembekalan BPD Kecamatan Sayung)
6. Pengamatan peneliti pada saat pembekalan terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) pada tanggal 10 juni sampai dengan tanggal 17 juni 2002, menemukan banyak sekali permasalahan yang dihadapi para peserta seputar kebingungan atas tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)
7. Belum ada satupun BPD di Kecamatan Sayung yang memenuhi standar minimal dalam pembuatan PERDES dalam tahun 2002 ini, yaitu PERDES tentang LPJ Lurah Desa, PERDES tentang RAPBDES dan PERDES

tentang Lelang Bondo Desa. (Catatan Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Sayung Tahun 2002).

8. Minimnya dana BPD yang hanya mengandalkan 10 % dari hasil lelang bondo desa saja, dan tidak memperoleh tambahan dana dari sumber yang lain. (Ketentuan dana BPD menurut Perda Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 1999).

Berdasarkan data tersebut di atas mengindikasikan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Badan Perwakilan Desa (BPD). Karena itulah peneliti ingin mengetahui dan meneliti tingkat efektifitas pelebagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung, dan mencari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelebagaan Badan Perwakilan Desa, baik faktor dari dalam lembaga itu sendiri maupun faktor dari luar lembaga itu. Dengan demikian peneliti dapat menemukan jawaban atas masalah tidak efektifnya Badan Perwakilan Desa yang ada di Kecamatan Sayung.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan kenyataan di lapangan dan data sementara yang didapatkan, peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagian besar Badan Perwakilan Desa yang ada di Kecamatan Sayung belum mengetahui tugas dan fungsinya secara jelas, karena

belum adanya kejelasan tentang tugas dan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD).

2. Rendahnya sumber-sumber daya yang ada pada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung, terutama sumber dana yang hanya mengandalkan 10 % dari hasil lelang bondu desa yang dimiliki oleh desa.

3. Adanya keterlambatan dari Pemerintah Daerah, baik dalam hal pelantikan terhadap anggota BPD maupun pembekalan terhadap anggota BPD di Kecamatan Sayung.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas peneliti merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan Badan Perwakilan Desa yang ada di Kecamatan Sayung, adalah sebagai berikut :

Apakah kurang efektifnya pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung itu dipengaruhi oleh faktor baik yang ada didalam lembaga maupun dari luar lembaga ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu *research*, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial, pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, (Sutrisno Hadi, 1994 : 3)

Sedangkan menurut Sofian Efendi (1996 : 12), tujuan pokok dari penelitian sosial adalah “ menerangkan fenomena sosial. Dalam memahami fenomena itu

seringkali peneliti menghubungkan fenomena tersebut dengan fenomena lain. Dengan demikian penelitian adalah suatu proses kegiatan ilmiah untuk memperoleh, memperdalam, menerangkan serta menguji suatu hasil pemikiran awal yang berupa dugaan tentang suatu masalah, dengan cara mengumpulkan data di lapangan sesuai dengan masalah yang ingin ditemukan dan diuji kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk :

1. Untuk melakukan analisis pelebagaan Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislasi di Desa.
2. Meneliti faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi pelebagaan Badan Perwakilan Desa.
3. Memberikan rekomendasi kepada aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan :

1. Tambahan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai analisis pelebagaan atau analisis organisasi publik.
2. Sumbang saran terhadap pembuat kebijakan agar mereka tahu tingkat efektifitas produk yang dihasilkan mereka.
3. Memberikan alternatif kepada peneliti lain yang masih ingin mengkaji tentang analisis pelebagaan atau analisis organisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pelembagaan

Sebelum peneliti membahas tentang definisi konsep pelembagaan dan variabel-variabel yang mempengaruhi pelembagaan, terlebih dahulu peneliti akan membahas apa hakekat pembangunan lembaga itu.

Menurut Milton J. Esman dalam Joseph W. Eaton (1986 : 24), pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan bagi organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang (a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik dan atau sosial, (b) menetapkan, mengembangkan dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan (c) memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.

Berdasarkan pengertian pembangunan lembaga tersebut di atas dapat dipahami bahwa hakekat pembangunan lembaga adalah sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan terhadap organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali karena adanya perubahan-perubahan yang timbul di masyarakat, misalnya :

- perubahan nilai-nilai

- perubahan teknologi fisik

- perubahan sosial masyarakat

Sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan lembaga akan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi perubahan yang ada disekitarnya.

Sedangkan pengertian pelembagaan (*institutionalisasi*) menurut Stephen P. Robbin (1996 : 288) adalah bila suatu organisasi itu telah memiliki kehidupannya sendiri, terlepas dari siapa anggotanya dan siapa pendirinya, dan memperoleh keabadian (*imortalitas*).

Maksudnya, bila suatu organisasi itu sudah melembaga, maka organisasi itu tidak akan mati walaupun ditinggal oleh pendirinya, karena lingkungan (masyarakat) sudah tidak lagi melihat lagi siapa pendirinya dan anggotanya, tetapi melihat organisasinya, tidak hanya sekedar barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi itu. Jika tujuan aslinya sudah tidak relevan lagi, maka organisasi itu tidak akan gulung tikar, malahan dapat mendefinisikan ulang dirinya. Kemudian menurut Milton J. Esman dalam Joseph W. Eaton (1986 : 40) pelembagaan berarti bahwa organisasi dan inovasi-inovasinya telah diterima dan didukung oleh lingkungan eksteralnya (masyarakat). Artinya, bahwa suatu organisasi sudah terlembaga, maka organisasi itu dapat diterima oleh masyarakat, termasuk inovasi-inovasi yang dibawa oleh organisasi itu. Oleh karena organisasi dan inovasinya telah diterima oleh masyarakat, maka masyarakat akan menyesuaikan dengan inovasi-inovasi yang telah dibawa oleh organisasi itu.

Sedangkan menurut Richard L. Duncan dan William S. Pooler dalam W. Eaton (1986 : 159) organisasi dapat dinamakan lembaga jika telah mengembangkan kemampuan " untuk bertindak sebagai wakil masyarakat yang lebih luas dengan menyediakan fungsi-fungsi dan pelayanan-pelayanan yang berharga. Lebih dari itu, lembaga itu merupakan model untuk menentukan pola-pola normatif dan nilai-nilai yang sah, melestarikan dan melindunginya bagi masyarakat yang lebih besar.

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang di Desa itu lahir dan dibentuk karena adanya perubahan-perubahan sosial yang ada di Negara kita, sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan kita, yang pada gilirannya juga membawa perubahan terhadap kelembagaan yang ada di Desa, dari yang semula Lembaga Masyarakat Desa (LMD) menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). Dengan adanya perubahan lembaga yang ada di Desa tersebut, diharapkan lembaga yang baru (BPD) dapat membantu masyarakat Desa dalam menghadapi tuntutan-tuntutan dan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Desa.

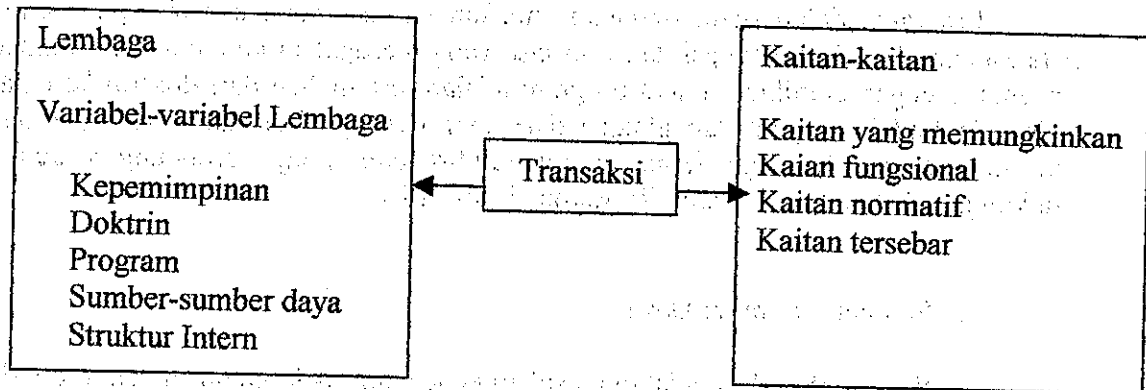
Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pembentukan BPD sudah mampu menjawab dan membantu masyarakat desa dalam menghadapi perubahan-perubahan di masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Milton J. Esman, Richard L. Duncan dan William S. Pooler di atas. Untuk meneliti dan menganalisis pelembagaan ada beberapa langkah yang ditawarkan oleh Nehnevajsa dalam Eaton (1986: 84), yaitu :

- 1). Analisis tujuan, melihat ide-ide pokok tujuan didirikannya suatu lembaga
- 2). Analisis realisasi, melihat realisasi dari tujuan, apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum
- 3). Analisis kurang prestasi, mencari sumber-sumber terjadinya ketidaksesuaian antara realisasi dengan kenyataan
- 4). Analisis pemecahan-pemecahan, yaitu mencari pemecahan atas kekurangan antara realisasi dengan kenyataan

Apabila peneliti amati BPD di Kecamatan Sayung, pada tahap tujuan dan realisasinya tidak ada masalah, karena tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah adalah membentuk suatu lembaga yang menjadi wakil masyarakat di desa, dan realisasinya lembaga tersebut menjadi kenyataan yaitu terbentuknya BPD di desa. Tetapi pada tahap operasionalnya, ternyata BPD mengalami suatu permasalahan atau hambatan, yaitu belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, bahkan ada yang tidak berfungsi sama sekali. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat berfungsinya BPD tersebut baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemecahan atau alternatif atas permasalahan yang menghambat berfungsinya BPD tersebut.

Selanjutnya Milton J. Esman menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi suatu lembaga itu efektif atau tidak. Yaitu, kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumberdaya, dan struktur intern, disamping ada kaitan-kaitan dengan variabel yang ada di luar lembaga itu. Yaitu, kaitan yang memungkinkan, kaitan fungsional, kaitan normative dan kaitan tersebar. Seperti yang digambarkan dalam diagram dibawah ini.

Gambar 2. 3. Model Pembangunan Lembaga dari Milton J. Esman



Sumber : Joseph W. Eaton (1986 : 24)

Kelima variabel yang seperti yang disebutkan dalam diagram tersebut diatas

itu adalah :

- a. **Kepemimpinan**
Kepemimpinan dalam lembaga adalah sekelompok orang yang secara aktif berkecimpung dalam perumusan doktrin dan program dari lembaga tersebut dan yang mengarahkan operasi-operasi dan hubungan-hubungannya dengan lingkungan tersebut. Kepemimpinan dipandang sebagai satu-satunya unsur yang paling kritis dalam pembangunan lembaga karena proses-proses perubahan yang dilakukan dengan sengaja itu memerlukan manajemen yang intensif, terampil, dan yang telah mengikat dirinya secara mendalam, baik dalam hubungan-hubungan intern maupun lingkungan. Kelompok kepemimpinan terdiri dari para pemegang kedudukan kepemimpinan yang secara formal telah ditunjuk, maupun mereka yang terus menerus menjalankan pengaruhnya yang penting terhadap kegiatan-kegiatan lembaga. (Joseph W. Eaton, 1986 : 24)
- b. **Doktrin**
Doktrin dirumuskan sebagai spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial. Doktrin dipandang sebagai sederetan tema yang memproyeksikan, baik didalam organisasi itu sendiri maupun dalam lingkungan eksternya, seperangkat citra dan harapan-harapan mengenai tujuan-tujuan lembaga dan gaya tindakan-tindakan. (Joseph W. Eaton, 1986 : 25)

c. Program

Program adalah suatu tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga tersebut. Dengan demikian, maka program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan nyata dan alokasi dari energi-energi dari sumber-sumber daya lainnya didalam lembaga lembaga itu sendiri dan yang berhubungan dengan lingkungan eksteralnya. (Joseph W. Eaton, 1986 : 25)

d. Sumber – Sumber Daya

Sumber-sumber daya adalah masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan penerangan dari lembaga tersebut. Jelasnya, bahwa persoalan-persoalan yang tercakup dalam pengerahan dan dalam menjamin tersedianya sumber-sumber daya tersebut secara mantap dan yang dapat diandalkan mempengaruhi tiap segi dari kegiatan-kegiatan lembaga dan merupakan kesibukan yang penting dari semua kepemimpinan lembaga. (Joseph W. Eaton, 1986 : 25)

e. Struktur Intern

Struktur Intern dirumuskan sebagai struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya. Pembagian dari peranan-peranan didalam organisasi tersebut, pola-pola wewenang internnya dan sistem-sistem komunikasinya, komitmen dari orang-orangnya pada doktrin dan program dari organisasi tersebut, akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah diprogram. (Joseph W. Eaton, 1986 : 25)

Kemudian masih menurut Milton J. Esman, bahwa suatu lembaga untuk dapat beradaptasi dan mendapat dukungan dari lingkungannya, maka lembaga itu harus menjalin hubungan dengan kaitan-kaitan yang ada di lingkungannya. Kaitan-kaitan

adalah kesaling ketergantungan yang ada diantara suatu lembaga dan bagian-bagian

masyarakat relevan yang lainnya. Organisasi yang dilembagakan tidak berada dalam isolasi, lembaga itu harus menetapkan dan memelihara suatu jaringan dari kelengkapan-kelengkapan dalam lingkungannya untuk tetap hidup dan berfungsi.

Kaitan-kaitan yang berhubungan dengan lembaga menurut Milton J. Esman ada empat jenis, yaitu :

a. Kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*)

Kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) adalah kaitan lembaga dengan organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang mengendalikan alokasi wewenang dan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh lembaga tersebut untuk berfungsi. (Joseph W. Eaton, 1986 : 25)

b. Kaitan-kaitan fungsional

Kaitan-kaitan fungsional adalah kaitan lembaga dengan organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan pelengkap dalam arti produksi, yang menyediakan masukan-masukan dan yang menggunakan keluaran-keluaran dari lembaga tersebut. (Joseph W. Eaton, 1986 : 26)

c. Kaitan-kaitan normatif

Kaitan-kaitan normatif adalah kaitan lembaga dengan lembaga-lembaga yang menetapkan norma-norma dan nilai-nilai (positif atau negatif) yang relevan bagi lembaga tersebut. (Joseph W. Eaton, 1986 : 26)

d. Kaitan-kaitan tersebar

Kaitan-kaitan tersebar yakni kaitan lembaga dengan unsur-unsur dalam masyarakat yang tidak dapat dengan jelas diidentifikasi oleh keanggotaan dalam organisasi formal. (Joseph W. Eaton, 1986 : 26)

Model pelebagaan yang dikembangkan oleh Milton J. Esman terdapat sebelas golongan konsep. Satu, kelembagaan yang dinyatakan sebagai hasil akhir

Yang lima adalah variabel-variabel lembaga, yaitu : kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumber daya dan struktur internal, yang dianggap sebagai variabel yang menjelaskan kelakuan dari lembaga. Sedangkan yang empat dikelompokkan sebagai kaitan-kaitan: yang memungkinkan, yang fungsional, yang normatif dan yang tersebar.

Sedangkan model pelebagaan yang dikembangkan oleh Saul M. Katz dalam Joseph W. Eaton (1986 : 176) memasukkan sembilan konsep dari konsep-konsep pelebagaan yang dikemukakan oleh Milton J. Esman dan menggolongkannya dalam tiga golongan.

Tiga golongan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Dimensi Tujuan

Lembaga atau organisasi dibangun diatas tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran, yang sifatnya dapat substantif dan instrumental.

Tujuan substantif adalah sumbangan-sumbangan yang diharapkan dari organisasi itu pada sasaran-sasaran pembangunan, yaitu sumbangannya berupa keluaran-keluaran dan pembaharuan kepada masyarakat. Tujuan substantif ini ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Yang nampak adalah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan yang tidak nampak adalah yang merupakan tujuan terselubung dari para sponsor politik yang membuat kebijakan tersebut. (Joseph W. Eaton, 1986 : 175)

Tujuan instrumental dapat dikenali pada model pembangunan lembaga adalah kelembagaan. Konsep ini berarti bahwa paling sedikit ada pola-pola hubungan dan kegiatan tertentu dalam organisasi yang normatif (mengikat), baik dalam organisasi itu maupun bagi lain-lain kesatuan sosial, dan bahwa telah memperoleh dukungan dan kelengkapan dari lingkungannya. (Joseph W. Eaton, 1986 : 175)

Tujuan-tujuan organisasi, dalam konsep-konsep yang merupakan pedoman awal, dikenali dalam doktrin. Yang mempunyai arti penegasan nilai-nilai, sasaran-sasaran, dan metode operasional yang mendasari kegiatan social. Doktrin dilihat

sebagai serangkaian tema-tema yang tercermin, baik dalam organisasi itu sendiri maupun dalam lingkungan diluarnya, sekumpulan citra-citra dan harapan-harapan mengenai tujuan-tujuan lembaga dan gaya-gaya kegiatan. (Joseph W. Eaton, 1986 : 175)

Sehingga dalam dimensi tujuan-tujuan Katz memasukkan variabel

kelembagaan dan doktrin.

b. Dimensi-Dimensi Sub-Subsistem Yang Fungsional

Suatu organisasi dalam menetapkan dan mencapai tujuan-tujuannya paling tidak harus melaksanakan empat fungsi. Empat fungsi dan satuan-satuan dalam organisasi menurut Katz (W. Eaton, 1986 : 176) dapat dinamakan empat sub-sistem yang fungsional. Yaitu :

Pertama, subsistem transformasi yang bertalian dengan perubahan masukan-masukan menjadi keluaran-keluaran atau hasil dari organisasi itu. Subsistem ini, yang terkadang dinamakan sistem produksi, konversi atau teknis, merupakan bagian yang utama dan sentral dalam setiap organisasi.

Kedua, subsistem pemeliharaan, yang seperti tersirat dalam namanya, bertugas memelihara kelakuan terpola yang perlu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan transformasi. Subsistem ini mempunyai segi-segi internal maupun eksternal. Internal ia bertugas memelihara kestabilan dan kesinambungan organisasi. Ini meliputi alokasi sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi. Eksternal ia bertugas memelihara hubungan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ia bertugas memperoleh masukan-masukan berupa sumber-sumber daya untuk mendukung organisasi.

Ketiga, subsistem penyesuaian, yang berurusan dengan kelangsungan hidup organisasi dan misinya menghadapi keadaan lingkungan yang mungkin sulit dan berubah-ubah.

Keempat, subsistem bimbingan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan organisasi yang ada di dalam organisasi itu, sehingga terjalin komunikasi yang baik diantara staf yang ada dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Pandangan tentang sub-subsistem yang fungsional itu tercermin dalam konsep pembangunan lembaga mengenai struktur internal yang berarti struktur dan proses-proses yang dibuat untuk melaksanakan lembaga itu dan untuk memeliharanya. Hal ini meliputi pembagian peranan-peranan dalam organisasi, pola-pola kewenangan dan sistem-sistem komunikasi didalamnya, komitmen personil kepada dotrin dan program organisasi.

c. Kaitan – Kaitan Dalam Lingkungan

Semua organisasi pastilah terkait dengan lingkungan untuk melakukan transaksi-transaksi baik itu berupa jasa, sumber-sumber daya, komoditi-komoditi maupun informasi. Secara umum ada empat kaitan dalam pembangunan lembaga,

tetapi disini Katz (Joseph W. Eaton, 1986.: 178) menambahkan sumber-sumber daya dan transaksi, sehingga kaitan-kaitan dalam lingkungan ada enam yaitu :

1. Kaitan yang memungkinkan

2. Kaitan fungsional

3. Kaitan normatif

4. Kaitan tersebar

5. Transaksi

6. Sumber-sumber daya

Jadi, model pembangunan lembaga yang dikembangkan oleh Saul M. Katz hanya memasukkan sembilan konsep dan menggolongkannya dalam tiga golongan. Dibawah tujuan dia membicarakan tentang doktrin dan kelembagaan. Dalam diskusi tentang sub-sistem yang fungsional, dia membicarakan struktur internal. Dan dibawah kaitan-kaitan dengan lingkungan dia membicarakan enam macam : yang memungkinkan (*enabling*), fungsional dia menambahkan sumber-sumber daya, normatif, menyebar dengan menambahkan transaksi. Sedangkan yang dua yaitu kepemimpinan dan program tidak dimasukkan karena dianggap meragukan dan berlebihan.

Beberapa variabel yang berhubungan dengan lembaga seperti yang telah dikemukakan oleh Milton J. Esman dan Saul M. Katz di atas, bila peneliti kaitkan dengan permasalahan yang ada pada lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung, data dan fakta yang di lapangan, dan berdasarkan pengamatan peneliti sementara, maka variabel yang mempengaruhi efektifitas Pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung adalah variabel sumber-sumber daya, struktur intern dan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*).

Indikator :

Indikator pelembagaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Kemandirian organisasi Badan Perwakilan Desa (BPD)

- Kemampuan BPD berinteraksi dengan lingkungan eksternya

- Dukungan dari lingkungannya

2. Sumber-Sumber Daya

Menurut Milton J. Esman. (Joseph W. Eaton, 1986 : 25) sumber-sumber daya adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi, dan penerangan dari lembaga tersebut.

Sedangkan menurut Saul M. Katz (Joseph W. Eaton, 1986 :178) sumber-sumber daya adalah masukan-masukan fisik, manusia, dan teknik dari pada lembaga.

Selanjutnya menurut Milton J. Esman sumber-sumber daya dapat dipandang sebagai masukan-masukan yang oleh organisasi diubah menjadi produk-produk atau jasa-jasa atau yang digunakan untuk menambah kemampuan-kemampuannya sendiri. Sumber-sumber daya dapat diklasifikasikan sebagai wewenang legal dan politik, kepegawaian, dana-dana, peralatan, fasilitas dan informasi. Persoalan yang dihadapi pembangunan lembaga adalah pengerahan, yaitu untuk menarik sumber-sumber daya tersebut ke organisasi dan untuk melancarkan program-program tindakan ini yang konsisten dengan kemampuan-kemampuan dari sumber-sumber daya tersebut pada setiap saat. Sumber-sumber daya tidak lamban sifatnya, mereka harus dikembangkan, digabung, dan disebarakan sebelum dapat menghasilkan keluaran-keluaran yang berguna.

Kemudian Milton J. Esman dalam Joseph W. Eaton, 1986 : 35 menyebutkan yang termasuk sumber-sumber daya adalah :

Pertama adalah *stafnya* (manusianya). Pengembangan staf adalah fungsi yang terus menerus dari para pembangun lembaga karena tenaga kerja dengan ketrampilan-ketrampilan, pengetahuan, dan komitmen-komitmen yang diprogram bagi hasil kerja yang efektif yang diperlukan dalam organisasi yang inovatif.

Untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang trampil perlu melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para anggota lembaga yang berkecimpung dalam lembaga tersebut, keterlambatan pelatihan dan kurang mengertian terhadap pemahaman lembaga bagi para anggotanya akan berakibat lembaga itu tidak dapat berfungsi atau tidak efektif. Begitu sebaliknya, bila para anggota lembaga tersebut memahami terhadap sesuatu atau program yang ada di lembaga itu ditambah dengan ketrampilan yang dimiliki oleh para anggota lembaga dari hasil pelatihan-pelatihan, maka lembaga itu akan efektif dan menghasilkan keluaran-keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lembaga itu.

Kedua *informasi* tentang lingkungan eksteralnya dan teknologi-teknologi baru harus dikumpulkan, dianalisis, diproses, disimpan, diambil kembali, dan disebarakan bila perlu, karena organisasi yang bekerja dalam kekosongan informasi tidak dapat mengambil suatu keputusan yang rasional.

Organisasi perlu secara terus menerus mengamati lingkungan eksteralnya bila ada perubahan-perubahan yang mungkin dapat membawa pengaruh terhadap kelangsungan dari lembaga tersebut. Dengan kata lain para anggota lembaga itu harus peka terhadap perkembangan lingkungan yang ada disekitarnya dan mengusahakan lembaga tersebut untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada diluar lembaga itu agar selalu eksis dalam menjalankan program-programnya.

Ketiga adalah *dana*, meskipun bukan satu-satunya yang diperlukan oleh lembaga (organisasi), namun dana sangat diperlukan untuk membiayai fasilitas dan peralatan maupun operasi-operasi yang sedang berlangsung. Sumber-sumber apapun yang menyediakan dana- penjualan produk-produk, anggaran-anggaran, sumbangan-sumbangan dari luar lembaga. Lembaga tanpa adanya dana yang memadai untuk

operasional organisasi itu, maka organisasi itu tidak akan berfungsi sama sekali dengan kata lain organisasi itu tidak efektif.

Selanjutnya menurut Henry Simamora. (1999 : 2) bahwa sumber-sumber daya dapat dikategorikan menjadi empat tipe, yaitu :

- Finansial, sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah keuangan
- Fisik, sumber-sumber yang berhubungan sesuatu yang berupa fisik, misalnya gedung, peralatan, dan lain sebagainya.
- Manusia, sumber-sumber yang berhubungan dengan kemampuan dan ketrampilan manusianya
- Kemampuan teknologis dan sistem, sumber-sumber yang berhubungan dengan teknologi yang dimiliki oleh lembaga itu juga kemampuan sistem dalam organisasi itu.

Kalau peneliti mengamati sumber-sumber daya yang ada pada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung memang sangat memprihatinkan dan masih jauh dari apa yang diharapkan oleh lembaga tersebut. Segi manusianya misalnya, hampir 81,8 % pendidikan dari para anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung berpendidikan SMP dan yang sederajat, ditambah dengan pembekalan tentang pengenalan program-program, tugas dan fungsi Badan Perwakilan Desa dari Pemerintah Daerah sangat minim dan waktunyapun juga terlambat, sehingga ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota BPD juga sangat minim. Dengan kemampuan yang minim terhadap organisasi yang diikutinya mana mungkin mereka dapat menjalankan tugas-tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD dengan baik.

Begitu juga dengan sumber finansialnya, dana yang dimiliki oleh Desa-Desa yang di Kecamatan Sayung dari Pendapatan Asli Desa sangat minim sekali, sehingga dana yang diperuntukkan untuk operasional Badan Perwakilan Desa juga sangat minim. Dengan keadaan dana yang minim itu, maka Badan Perwakilan Desa juga berjalan apa adanya, dengan pengertian berjalan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan dana yang ada. Untuk melakukan hal-hal yang baru belum dapat dilaksanakan.

Apalagi kalau dikaitkan dengan teknologi dan pengaruh eksteralnya, maka sangat jauh sekali, sebab teknologi yang dimiliki oleh Badan Perwakilan Desa dengan kondisi finansial yang demikian itu, hanya mampu menyediakan dan membeli peralatan untuk surat menyurat (alat ketik), sehingga untuk dapat menyesuaikan dengan pengaruh eksteralnya, itu sangat berat sekali. Jadi kesimpulannya, sumber-sumber daya yang ada pada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung sangat minim sekali.

Oleh karena itu pengaruh sumber-sumber daya terhadap lembaga itu sangat berpengaruh sekali, sebab jalannya roda lembaga itu tergantung adanya sumber-sumber daya yang dimiliki oleh lembaga itu.

Selanjutnya G.R. Terry dalam bukunya H. Malayu S.P. Hasibuan (1999: 3) mengatakan bahwa dalam organisasi itu perlu adanya pengaturan terhadap pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan.

Maksudnya, meskipun dalam organisasi itu terdapat sumber-sumber daya yang lengkap yang dibutuhkan terhadap berjalannya suatu organisasi itu tetapi bila tidak ada pengaturan yang baik, maka sumber-sumber daya juga tidak akan berfungsi dengan baik. Sehingga kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan sumber-sumber daya adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga itu, baik finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi.

Indikator : Indikator sumber-sumber daya adalah sebagai berikut:

- Kemampuan Sumber Daya Manusianya
- Besar dana yang dimiliki
- Kondisi fisik dari lembaga itu (kantor, prasarana yang dimiliki)

3. Struktur Intern

Tiap organisasi, termasuk organisasi yang sudah melembaga, harus mencapai kompetisi teknis dalam semua komponennya dan kepaduan yang efektif di antara komponen-komponen tersebut. Kebutuhan untuk menjamin keterpaduan demikian dimasukkan dalam suatu kelompok variabel-variabel yang disebut dengan *struktur intern*. Menurut Milton J. Esman (Joseph W. Eaton, 1986 : 25) yang disebut dengan struktur intern itu adalah struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya.

Sedangkan menurut Saul M. Katz (Joseph W. Eaton 1986 : 176) struktur internal adalah struktur dan proses-proses yang dibuat untuk melaksanakan lembaga itu dan untuk memeliharanya.

Selanjutnya menurut Milton J. Esman (Joseph W. Eaton, 1986 : 36) struktur intern ini mencakup pola-pola wewenang formal dan informal, pembagian kerja diantara komponen-komponen, saluran-saluran komunikasi diantara mereka, dan metode-metode penengahan dan pemecahan dari perselisihan-perselisihan yang pasti akan timbul mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan, prioritas-prioritas, alokasi-alokasi sumber daya, dan bahkan mengenai kepribadian-kepribadian dalam tiap struktur sosial yang kompleks. Pembentukan struktur intern mungkin akan memerlukan taktik yang berbeda dalam organisasi-organisasi yang baru dan yang disusun kembali.

Kemudian menurut Gabriel Almond (1978) dalam bahan kuliah yang disampaikan oleh Drs. Edi Santoso, SU, mengatakan bahwa kinerja lembaga politik ditentukan oleh sejumlah fungsi, yakni :

- a. Fungsi pembuatan peraturan
- b. Fungsi melaksanakan peraturan
- c. Fungsi penghakiman
- d. Fungsi kapabilitas kelembagaan dan aparatur

Artinya, dalam menganalisis struktural-fungsional yang ada pada suatu lembaga politik, kita dapat melihat bagaimana fungsi-fungsi yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam tugas dan fungsi yang ada pada Badan Perwakilan Desa, yang mempunyai fungsi legislasi yaitu membuat dan menetapkan peraturan-peraturan desa (perdes), dan fungsi kontrol yakni melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa, apakah sudah berjalan dengan baik atau

belum. Kalau sudah berjalan dengan baik, berarti lembaga tersebut sudah berfungsi, tetapi apabila belum berjalan dengan baik, maka lembaga tersebut belum berfungsi.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut perlu adanya suatu penataan-penataan dan pembagian kerja yang jelas dan sistimatis, sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Menurut James L. Gibson, dkk (1992 : 324) struktur itu betautan dengan hubungan yang relatif pasti yang terdapat diantara pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi. Hubungan yang pasti itu timbul dari proses hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembagian kerja (*division of labor*), yakni bahwa didalam organisasi itu harus ada pembagian kerja yang jelas bagi para anggotanya. Pembagian kerja ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para anggota supaya dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal.
- b. Departementalisasi (*departmentalization*) artinya, dari pekerjaan individu yang telah dibagi atas spesifikasi tugas tadi dikelompokkan kembali menjadi satu kelompok kerja agar dalam pengontrolan pekerjaan akan lebih mudah dan terarah.
- c. Rentang kendali (*span of control*) yakni ukuran yang tepat bagi kelompok untuk melapor kepada satu atasan tertentu terhadap hasil kerja yang telah dicapai.
- d. Delegasi (*delegation*) yakni wewenang yang telah dibagi-bagikan dan dimiliki oleh individu atau kelompok dalam organisasi untuk melakukan pekerjaannya.

Dengan demikian, apabila dalam suatu lembaga tidak ada kejelasan tentang pembagian tugas, tidak ada spesifikasi pekerjaan, dan kurangnya wewenang, maka lembaga tersebut tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Seperti halnya yang ada pada BPD di Kecamatan Sayung struktur intern-nya belum tertata baik dan belum adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas dari lembaga kepada para anggotanya, sehingga tugas dan fungsinya baik sebagai lembaga legislatif maupun sebagai lembaga kontrol yang ada di desa tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya Prof. DR. Mr. S. Pradjudi Atmosudiro dalam Malayu S.P. Hasibuan (1999 : 27) mengatakan “ bahwa struktur yang ada dalam organisasi merupakan salah satu unsur adanya suatu organisasi “. Artinya, organisasi itu baru dikatakan ada atau berfungsi bila dalam organisasi itu terdapat strukturnya; dimana struktur itu bukan hanya merupakan susunan keorganisasian saja, tetapi bagaimana struktur yang dibuat itu dapat berfungsi dan berjalan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Oleh karena itu dalam struktur itu harus ada kejelasan tugas dan wewenang oleh masing-masing bagian yang ada dalam struktur itu.

Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan struktur intern adalah organisasi yang ada didalam lembaga itu yang merupakan bagian-bagaian dari lembaga, yang mempunyai kejelasan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut.

Dengan demikian, pengaruh struktur intern dalam suatu lembaga itu sangat berpengaruh sekali untuk kelangsungan dan fungsi lembaga tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator : Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Indikator struktur intern dalam penelitian ini adalah :

- Kejelasan pembagian pekerjaan

- Departementalisasi

- Rentang kendali di BPD

- Kejelasan wewenang yang dimiliki oleh para anggota

4. **Kaitan-Kaitan Yang Memungkinkan (*Enabling*)**

Menurut Milton J. Esman (Joseph W. Eaton, 1986 : 25) yang dimaksud

dengan kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) adalah kaitan-kaitan dengan

organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang mengendalikan alokasi

wewenang dan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh lembaga tersebut untuk

berfungsi.

Sedangkan menurut Saul M. Katz : (Joseph W. Eaton, 1986 : 178) kaitan-

kaitan yang memungkinkan itu adalah kaitan yang menghubungkan sistem organisasi

itu dengan organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, dan individu-individu yang

berwenang.

Selanjutnya Milton J. Esman (Joseph W. Eaton, 1986 : 37) mengatakan kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) menyediakan wewenang untuk bekerja dan mencapai sumber-sumber daya yang esensial. Kaitan-kaitan yang memungkinkan ini juga dapat digunakan untuk melindungi organisasi (lembaga) tersebut terhadap serangan dan untuk menjamin pencapaiannya ke sumber-sumber daya selama masa kritis sementara ia membangun kemampuan-kemampuannya.

Suatu organisasi yang sudah melembaga bukan berarti organisasi itu berdiri sendiri dan tidak mempunyai kaitan-kaitan dengan organisasi lain. Ia harus menetapkan dan memelihara suatu jaringan dari kelengkapan-kelengkapan dalam lingkungan untuk tetap hidup dan berfungsi. Dipihak lain, lingkungan tersebut tidak dipandang sebagai suatu massa yang umum, tetapi lebih sebagai perangkat struktur tersendiri dengan mana lembaga yang bersangkutan harus bergaul.

Seperti yang dikatakan oleh Milton J. Esman (Joseph W. Eaton, 1986 : 36) bahwa lembaga tersebut harus memelihara suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah organisasi yang terbatas yang melibatkan diri dalam transaksi-transaksi dengan maksud untuk memperoleh dukungan, mengatasi perlawanan, pertukaran-pertukaran sumber daya, penataan lingkungan tersebut, dan memindahkan norma-norma dan nilai-nilai. Misalnya lembaga harus melakukan hubungan dengan kaitan-kaitan yang memungkinkan, yaitu dengan badan-badan atau orang yang membawahnya dan yang menyediakan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh lembaga itu.

Selanjutnya Jiri Nehnevajsa (Joseph W. Eaton, 1986 : 94) Kaitan-kaitan yang memungkinkan itu bisa saja dari badan-badan yang ada diatas lembaga, juga bisa dari lembaga yang memberikan ruang gerak terhadap berfungsinya lembaga itu. Badan-badan atau orang yang merupakan kaitan yang memungkinkan ini merupakan tempat dimana lembaga itu harus bertanggung jawab dan memperoleh dukungan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh lembaga itu.

Hal ini dapat kita lihat pada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang harus melakukan hubungan-hubungan dengan kaitan-kaitan yang memungkinkan, antara lain dengan :

- a. Pemerintah Daerah
- b. Pemerintah Desa
- c. Partai Politik
- d. Lembaga-lembaga lain di desa

a. Pemerintah Daerah

Kaitan BPD dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang memberikan dukungan dan legitimasi serta wewenang terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD), sebab BPD merupakan produk dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2000, sehingga cara kerja BPD juga harus mengacu pada Pemerintah Daerah yaitu berupa Peraturan-Peraturan yang dikeluarkannya yang berhubungan dengan keberadaan BPD tersebut. Dan Pemerintah Daerah-lah yang memberikan wewenang terhadap BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa, yang dulunya merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah dan sekarang BPD-lah yang menjalankan wewenang Pemerintah Daerah yang ada di Desa, sehingga BPD harus bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

Wewenang BPD di desa itu adalah seperti yang sudah ditetapkan dengan Peraturan-Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Demak, antara lain:

- 1). Perda Nomor 08 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa

- 2). Perda Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Lurah Desa

- 3). Perda Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Pamong Desa

- 4). Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembuatan Peraturan Desa

5). Perda Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Pamong Desa

6). Perda Nomor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

Secara umum kewenangan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa itu meliputi :

- Mengangkat dan memberhentikan Lurah Desa;
- Mengangkat dan memberhentikan Pamong Desa;
- Menerima dan menolak Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Lurah Desa
- Menetapkan dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES)

Kewenangan tersebut di atas tidak begitu saja dilaksanakan semauanya oleh BPD, karena kewenangan tersebut sudah diatur oleh Peraturan-Peraturan Daerah seperti yang telah disebutkan di atas. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD tidak boleh melanggar pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan di akhir jabatannya kepada Bupati selaku Kepala Daerah. Bila ternyata ada BPD yang berjalan tidak sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka Bupati dapat mencabut mandat yang telah diberikan kepada BPD.

b. Pemerintah Desa

Kaitan BPD dengan Pemerintah Desa berangkat dari pemahaman bahwa Pemerintah Desa merupakan lembaga yang menyediakan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh BPD dan yang memberikan ruang gerak terhadap berfungsinya lembaga tersebut di Desa. Dengan demikian keterkaitan antara BPD dengan Pemerintah Desa sangat penting sekali, karena tanpa adanya penyediaan sumber-sumber daya dari Pemerintah Desa, maka BPD tidak akan dapat berjalan dan berfungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Begitu juga sebaliknya Pemerintah Desa juga harus mau menerima dan menyadari tentang tugas dan fungsi yang diemban dan yang harus dijalankan oleh BPD, sehingga Pemerintah Desa mau memberikan kesempatan dan ruang gerak terhadap berfungsinya BPD tersebut.

Adapun fungsi dari BPD adalah:

1. Sebagai Badan Legislasi yang ada di Desa
 2. Sebagai pengawas terhadap Pemerintah Desa
 3. Menampung aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang
- Didalam Perda Nomor 07 Tahun 2000 Pemerintah Daerah Kabupaten Demak disebutkan bahwa "Badan Perwakilan Desa adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang ada di Desa".

Sebagai mitra kerja maka BPD harus dapat membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan pembangunan di desa. Antara BPD dan Pemerintah Desa mengetahui wilayah masing-masing, BPD sebagai Legislator yakni membuat Peraturan-Peraturan

Desa yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa sebagai Eksekutor yakni menjalankan Peraturan-Peraturan yang telah dibuat oleh BPD tersebut, sehingga antara BPD dan Pemerintah Desa saling menunjang dan ada keseimbangan. Memang, tidak dapat dipungkiri kehadiran BPD oleh sebagian Kepala Desa ada yang merasa sebagai sesuatu yang sangat menakutkan dan menjengkelkan, karena BPD akan menghambat perjalanan dari Pemerintah Desa. Tetapi ada juga yang merasa bahwa kehadiran BPD itu sebagai sesuatu yang menyenangkan karena akan dapat meringankan masalah-masalah yang ada di desa yang selama ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa saja. Dengan hadirnya BPD sebagian masalah itu menjadi wewenang BPD, sehingga tugas dari Pemerintah Desa akan sedikit berkurang.

2. **c. Partai Politik** Keterkaitan BPD dengan partai politik sangat kental sekali. Kita tahu bahwa

Keterkaitan BPD dengan partai politik sangat kental sekali. Kita tahu bahwa anggota BPD berasal dari kader-kader partai politik yang ada di ranting-ranting (desa), sebab syarat bagi calon anggota BPD yang ingin menjadi anggota BPD adalah orang-orang yang mewakili organisasi-organisasi sosial yang ada di desa atau yang mewakili partai-partai tertentu yang ada di desa. Oleh karena itu keberadaan BPD tidak dapat dilepaskan dengan organisasi sosial atau partai politik yang diwakilinya. Perilaku organisasi atau partai politik yang diwakilinya pasti akan terbawa didalam BPD, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh BPD lebih besar berpihak kepada organisasi atau partai yang diwakilinya dari pada berpihak kepada masyarakat yang seharusnya diperjuangkan oleh BPD selaku lembaga yang

mempunyai fungsi menampung aspirasi masyarakat, bukan aspirasi organisasi atau partai politik. Maka tidak heran jika kita menjumpai anggota BPD yang kerjanya hanya mencari-cari kesalahan dari Pemerintah Desa atau lawan politiknya, yang seharusnya hal tersebut harus dihindari oleh BPD sebagai lembaga yang mandiri dan lembaga yang netral, tapi hal tersebut sulit dihindari oleh lembaga yang katanya netral tersebut.

d. Lembaga-Lembaga lain di desa

Keterkaitan Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan lembaga-lembaga lain yang di desa tidak dapat dipisahkan, seperti keterkaitan dengan lembaga keagamaan, lembaga kepemudaan dan organisasi-organisasi sosial yang ada di desa. Disamping, partai politik lembaga-lembaga yang ada di desa juga mewarnai setiap kebijakan yang akan diambil oleh BPD, karena lembaga-lembaga yang ada di desa juga sangat berpengaruh didalam pembangunan desa. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh BPD harus memperhatikan juga apa keinginan atau aspirasi lembaga yang ada di desa itu, sebab bila tidak memperhatikan suara dari sebagian lembaga-lembaga tersebut, maka BPD akan mengalami kesulitan pada waktu implementasi kebijakan yang telah diputuskan tersebut, sebab tidak ada dukungan dari lembaga-lembaga yang ada di desa itu. Keterkaitan dan pengaruh lembaga-lembaga lain terhadap BPD juga sangat besar sekali; sebab efektifitas BPD akan mulus jika ada dukungan dan legitimasi dari lembaga yang sudah ada sebelum adanya BPD dibentuk.

Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak akan berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan Pemerintah Daerah (PEMDA), Pemerintah Desa, partai politik dan lembaga-lembaga lain yang ada di desa. Dengan kata lain BPD tidak akan berfungsi jika tidak melakukan hubungan-hubungan dengan organisasi-organisasi atau badan-badan baik yang ada di atasnya maupun yang ada di Desa yang merupakan penyedia dari sumber-sumber daya yang diperlukan oleh BPD. Dengan demikian keterkaitan BPD dengan kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) itu sangat erat sekali terhadap efektifitas atau berfungsinya BPD tersebut.

Jadi kesimpulannya, kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) itu adalah hubungan lembaga dengan organisasi atau kelompok sosial yang mengalokasikan wewenang dan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh lembaga itu untuk dapat berfungsi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator :

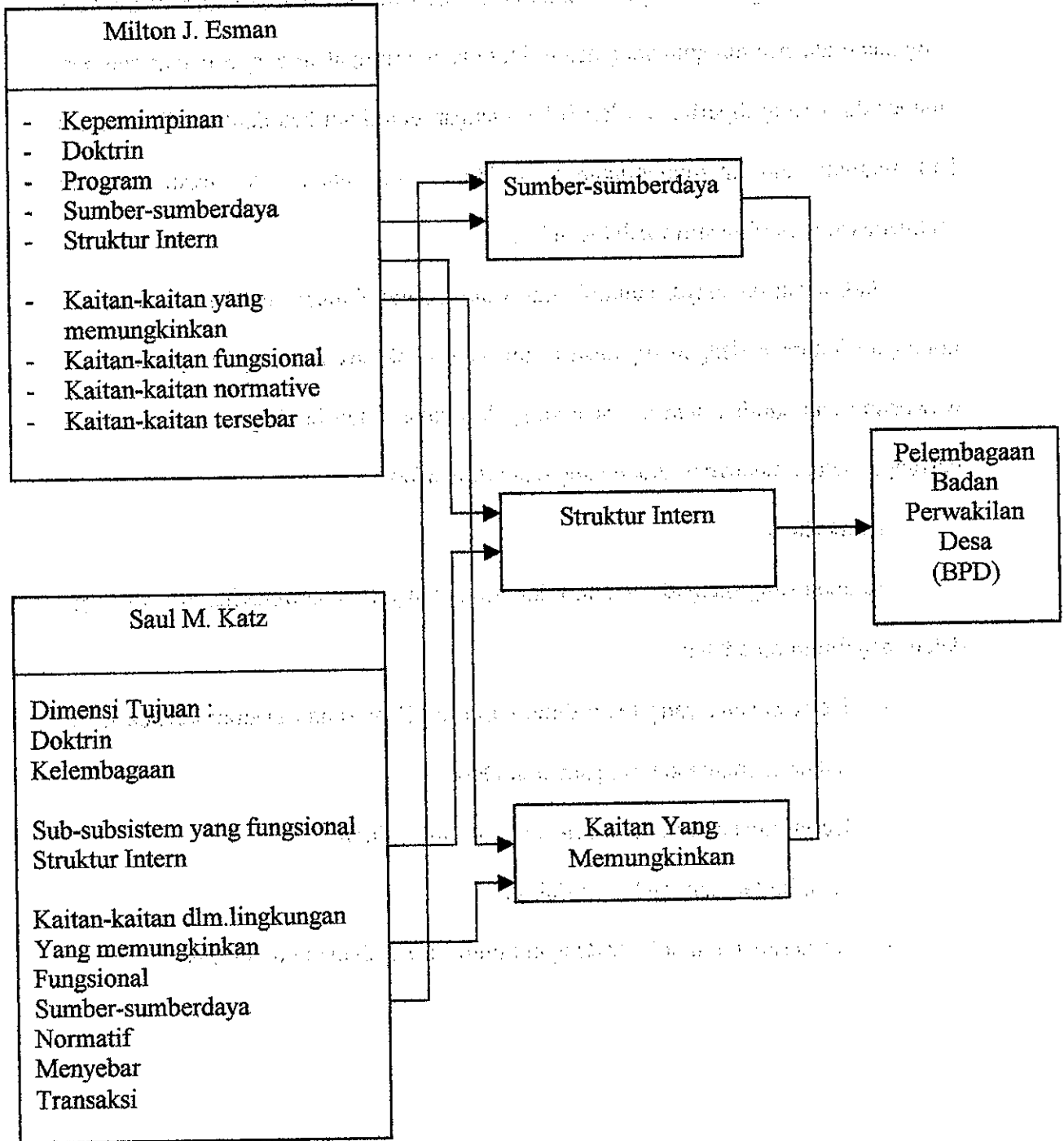
Adapun yang menjadi indikator kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) dalam penelitian ini adalah :

- Kewewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa.
- Kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa
- Keterkaitan dengan Partai Politik
- Kerja sama antara BPD dengan Lembaga-Lembaga lain di Desa

Gambar 2. 3: Variabel-variabel yang mempengaruhi

**Variabel-Variabel yang mempengaruhi
Pelebagaan Badan Perwakilan Desa (BPD)**

Di Kecamatan Sayung



B. Hipotesis

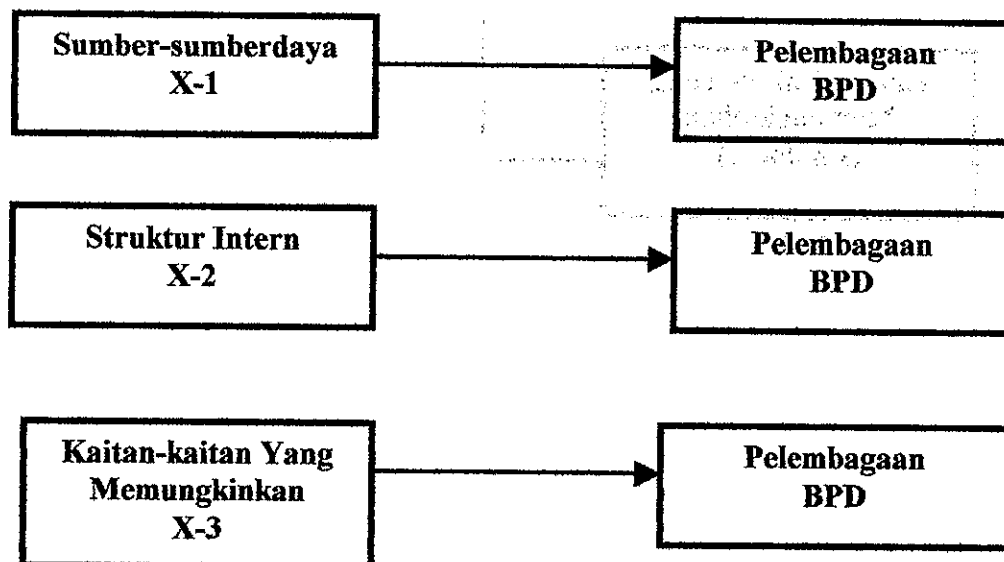
Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas tentang variabel-variabel yang mempengaruhi efektifitas pelebagaan BPD yang ada di Kecamatan Sayung, maka peneliti menetapkan hipotesisnya sebagai berikut :

B. 1. Hipotesis Minor

1. Ada hubungan yang signifikan variabel sumber-sumber daya (X-1) terhadap pelebagaan BPD di Kecamatan Sayung (Y).
2. Ada hubungan yang signifikan variabel struktur intern terhadap pelebagaan BPD di Kecamatan Sayung (Y).
3. Aada hubungan yang signifikan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan terhadap pelebagaan BPD di Kecamatan Sayung (Y).

Gambar 2: 4

Hipotesis Minor secara geometris

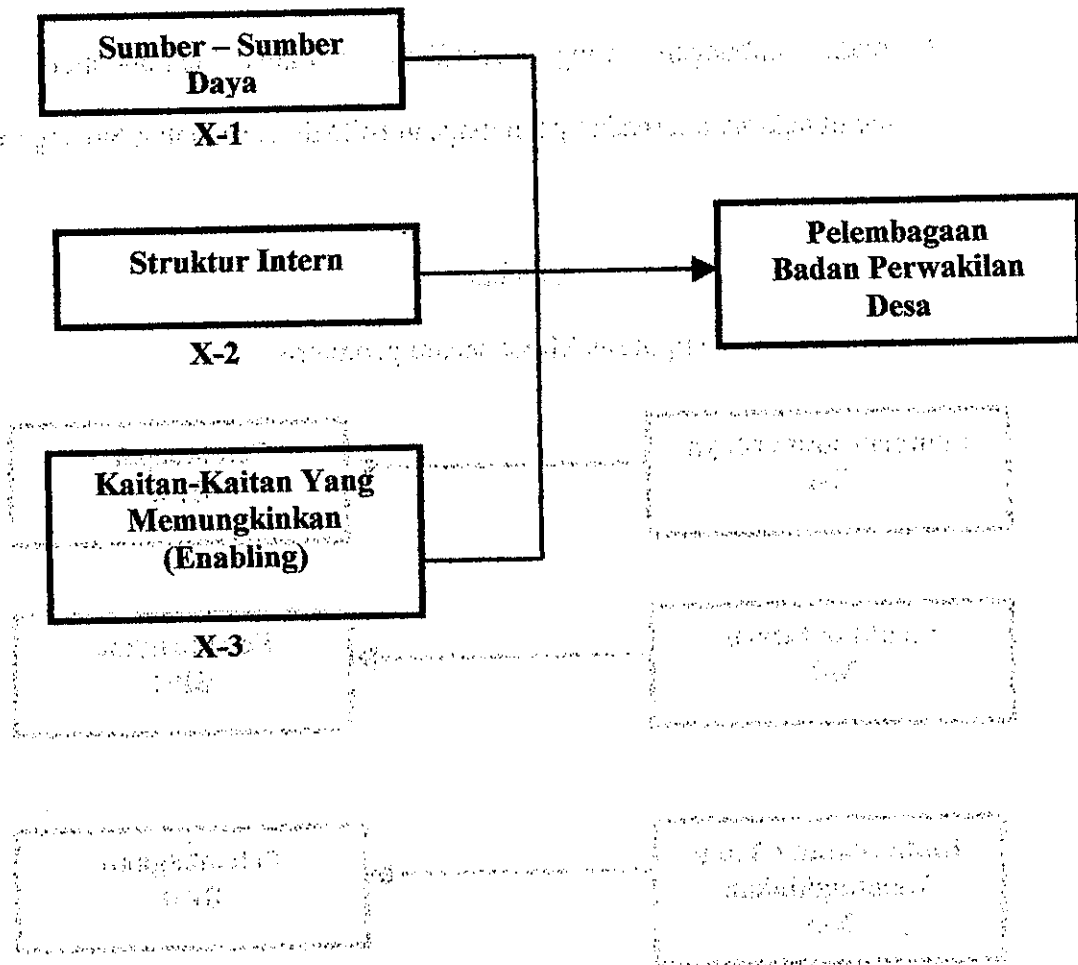


B. 2. Hipotesis Mayor

Ada hubungan yang signifikan variabel sumber-sumber daya (X-1), variabel struktur intern (X-2), dan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (X-3) terhadap pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kecamatan Sayung (Y).

Gambar 2.5

Hipotesis Mayor secara geometris



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang digabung dengan metode penelitian kualitatif dalam menjelaskan hasil temuan-temuan dari metode kuantitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner dan wawancara dengan anggota-anggota BPD yang berkenaan dengan efektifitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, disamping melalui pengamatan terhadap efektifitas BPD. Disamping itu untuk melengkapi teknik tersebut di atas juga peneliti akan mengumpulkan data-data melalui dokumen-dokumen dan data-data sekunder yang diperlukan di lokasi penelitian. Dalam melakukan analisis data, peneliti lebih menekankan pada masalah-masalah yang mempengaruhi pelembagaan Badan Perwakilan Desa baik yang dari dalam maupun dari luar lembaga itu, untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada pada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung.

B. Ruang Lingkup

Penelitian tentang hal-hal yang mempengaruhi efektifitas BPD yang ada di Kecamatan Sayung, dibatasi pada factor-faktor :

- Sumber-sumber daya yang ada pada BPD di Kecamatan Sayung
- Struktur intern yang ada pada BPD di Kecamatan Sayung
- Kaitan (hubungan) BPD dengan organisasi lain yang ada di Desa

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kecamatan Sayung, yang terdiri dari 20 Desa.

D. Variabel Penelitian

1. Klasifikasi Variabel

a. Variabel Independen

- a.1. Sumber-Sumber Daya sebagai variabel bebas (X-1)
- a.2. Struktur Inter sebagai variabel bebas (X-2)
- a.3. Kaitan-Kaitan yang memungkinkan sebagai variabel bebas (X-3)

b. Variabel Dependen

Pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kecamatan Sayung (Y).

2. Definisi Konseptual

a. Pelembagaan

Pelembagaan atau lembaga adalah organisasi yang berdiri sendiri dan yang membawa inovasi-inovasi baru bagi masyarakat dan mendapat dukungan serta kelengkapan dari lingkungannya.

b. Sumber-Sumber Daya

Sumber-sumber daya adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga itu, baik finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi.

c. Struktur Intern

Struktur intern adalah organisasi yang ada didalam suatu lembaga yang merupakan bagian-bagaian dari lembaga, yang mempunyai kejelasan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut.

d. Kaitan – Kaitan Yang Memungkinkan (*enabling*)

Kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) adalah hubungan lembaga dengan organisasi-organisasi atau kelompok sosial yang mengendalikan alokasi wewenang dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh lembaga.

3. Definisi Operasional

a. Pelembagaan

Variabel pelembagaan ini diukur dengan :

1. Kemandirian BPD

- Tingkat kemandirian BPD dalam menjalankan fungsi legislasi di Desa
- Tingkat kemandirian BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa

2. Kemampuan BPD dalam berinteraksi

- Tingkat kemampuan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat
- Tingkat kemampuan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat
- Tingkat kemampuan BPD dalam berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan fungsinya

3. Dukungan dari lingkungan

- Tingkat dukungan masyarakat terhadap BPD
- Tingkat dukungan Pemerintah Daerah terhadap BPD
- Tingkat pemberdayaan terhadap anggota BPD oleh Pemda

b. Sumber – Sumber Daya

Variabel sumber-sumber daya ini diukur dengan :

1. Sumber Daya Manusianya (SDM)

- Tingkat pendidikan formal anggota BPD
- Tingkat pendidikan informal anggota BPD
- Tingkat kemampuan menyusun program bagi BPD
- Tingkat kemampuan merealisasikan rencana program

2. Sumber dana

- Dana yang dimiliki oleh BPD
- Tingkat kecukupan dana untuk operasional BPD
- Sumber dana yang diperoleh BPD

3. Kondisi fisik yang dimiliki lembaga

- Kualitas perlengkapan kantor yang dimiliki BPD
- Kelengkapan peralatan kantor yang dimiliki BPD

c. Struktur Intern

Variabel struktur intern diukur dengan:

1. Pembagian Kerja

- Tingkat kejelasan pembagian kerja anggota BPD
- Spesifikasi pekerjaan anggota BPD
- Jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan

2. Departementalisasi

- Tingkat heterogenitas pekerjaan yang dikelompokkan
- Tingkat homogenitas pekerjaan yang dikelompokkan

3. Rentang Kendali

4. Kesesuaian jumlah anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya

- Pola hubungan antara pimpinan dengan anggota
- Tingkat kontak antara pimpinan dengan anggota

4. Kejelasan Wewenang

- Tingkat wewenang yang diberikan oleh pimpinan kepada anggota
- Tingkat partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan

d. Kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*)

Variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan diukur dari :

1. Kewenangan yang diberikan oleh Pemda

- Tingkat kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Lurah
Desa

- Tingkat kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Pamong
Desa

- Tingkat kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah
Desa

- Tingkat kewenangan dalam pembuatan Peraturan-Peraturan Desa

2. Kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa

- Tingkat kerja sama BPD dan Pemerintah Desa dalam Pembuatan
Peraturan-Peraturan Desa

- Kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa dalam melaksanakan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- Kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam program
pembangunan di Desa

- Tingkat kerja sama BPD dan Pemerintah Desa dalam menggali dan
mengolah potensi desa

3. Keterkaitan BPD dengan Partai Politik

3.1.1. - Tingkat keterkaitan BPD dengan partai politik dalam pengambilan keputusan

- Tingkat sumbang saran partai politik kepada BPD
- Tingkat campur tangan partai politik kepada BPD

3.1.2. - Tingkat keterkaitan BPD dengan partai politik dalam pengambilan keputusan

4. Kerja sama antara BPD dengan Lembaga-Lembaga lain di Desa

4.1.1. - Tingkat dukungan LKMD terhadap BPD

4.1.2. - Keaktifan lembaga-lembaga lain dalam memberikan masukan kepada BPD

4.1.3. - Kerja sama antara BPD dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Desa

4.1.4. - Tingkat keterkaitan BPD dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Desa

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan :

1.1.1. Jenis Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua jenis data, yaitu :

e. Data Kuantitatif.

Yaitu data yang berupa angka-angka, table-tabel, skala, formula dan sebagian besar menggunakan perhitungan angka-angka.

1.1.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua sumber data, yaitu :

f. **Data Kualitatif.** (Sugiono, 2009: 103)

Yaitu data-data yang sukar diukur dengan angka-angka atau ukuran-ukuran perhitungan matematika. Yang diambil dari hasil wawancara dengan para guide.

2. **Sumber Data** (Sugiono, 2009: 103)

a. **Sumber Data Primer** yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner dan interviu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang meliputi data tentang sumber-sumberdaya, struktur intern dan kaitan-kaitan BPD di Kecamatan Sayung.

b. **Sumber Data Sekunder** yaitu sumber data yang diperoleh tidak secara langsung tetapi diperoleh dari dokumen, mass media, laporan-laporan, data statistik dan data monografi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Tentang laporan-laporan yang ada di Kantor Kecamatan Sayung, baik itu berupa Perdes-Perdes yang dihasilkan oleh BPD maupun catatan tentang prestasi yang dicapai oleh BPD yang ada di Kecamatan Sayung.

F. Instrumen Penelitian (Sugiono, 2009: 103)

Instrumen adalah sebagai alat bantu dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dengan memilih suatu pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan skor atas jawaban

pertanyaan tersebut. Yang terdiri dari 54 pertanyaan yang harus dijawab oleh 40 responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Yang kemudian menjadi langkah selanjutnya untuk pembuktian hipotesis.

G. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPD yang ada di Kecamatan Sayung, yang berjumlah 20 (dua puluh) desa, sehingga jumlah Badan Perwakilan Desa yang ada di Kecamatan Sayung juga berjumlah 20 (dua puluh) Desa.

Karena yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah organisasi, maka unit analisisnya adalah organisasi. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya peneliti menggunakan teknik *Quota Sampling*, yaitu teknik sampling dengan cara memilih orang-orang yang mengetahui secara persis permasalahan yang ada pada pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung.

Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti mengambil perwakilan dari masing-masing lembaga untuk menjadi sampel, yaitu 1 (satu) orang dari ketua yang mewakili lembaga yang dipimpinnya, dan 1 (satu) orang dari anggota yang mewakili semua anggota yang ada di lembaga itu. Oleh karena jumlah BPD yang ada di Kecamatan Sayung berjumlah 20 buah, maka jumlah sampelnya adalah 20 orang ketua dan 20 orang anggota, sehingga berjumlah 40 orang.

adalah sebagai berikut yang diuraikan di bab sebelumnya. Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan :

1. Kuesioner

Merupakan suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan untuk memperoleh data berupa jawaban dari responden. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas pelebagaan BPD di Kecamatan Sayung, baik berupa sumber-sumberdaya, struktur intern maupun kaitan-kaitan BPD dengan organisasi atau lembaga lain.

2. Observasi

Suatu cara yang digunakan untuk mengamati obyek penelitian secara langsung melaksanakan pengamatan di lapangan. Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap aktifitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa.

3. Interview Guide

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Badan Perwakilan Desa, baik dari kalangan para anggota BPD sendiri, maupun kepada pihak-pihak diluar BPD yang erat kaitannya dengan keberadaan

Lembaga BPD tersebut. Tentang hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung.

4. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen pada obyek penelitian yang berupa buku-buku Perda, Perdes, Peraturan Desa, laporan-laporan, tabel-tabel yang berkaitan dengan penelitian. Tentang laporan-laporan atau catatan BPD yang ada di Kantor Kecamatan Sayung.

I. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Analisa Data

a. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif adalah analisa data yang digunakan untuk mengolah data yang sifatnya nyata biasanya berbentuk angka-angka dengan menggunakan rumus statistik atau uji statistik. Dalam penelitian ini data yang peneliti gunakan adalah data ordinal dengan menggunakan skala pengukuran :

- Skala Likert yang mempunyai gradasi sebagai berikut:

Sangat tinggi/sangat baik/sangat sesuai/sangat memadai diberi skor 4

Tinggi/baik/memadai diberi skor 3

Kurang baik/kurang sesuai/kurang memadai diberi skor 2

Tidak baik/tidak sesuai/tidak memadai diberi skor 1

yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah sebagai berikut:

- Skala Guttman yang hanya mempunyai dua jawaban, yaitu :

Untuk jawaban ya/setuju diberi skor 4

Untuk jawaban tidak/tidak setuju diberi skor 1

Analisa kuantitatif: Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif merupakan suatu analisa dari data-data yang tidak berwujud angka-angka atau data yang sifatnya tidak diukur dengan angka dan cara mengolah data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak anggota Badan Perwakilan Desa atau pihak-pihak di luar BPD, baik Pemerintahan Desa maupun instansi-instansi terkait.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data kuantitatif dan analisa kualitatif, karena data-data yang diperoleh dari lapangan akan diuji dengan menggunakan uji statistik kemudian dari hasil itu akan dideskripsikan dengan menggunakan metode kualitatif.

2. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah diajukan dapat diterima atau ditolak, maka perlu diuji kebenarannya pada masing-masing variabel yang hendak diteliti, oleh karena itu teknik analisis yang digunakan adalah pengujian hipotesis asosiatif yang akan diuji dengan korelasi Rank Spearman (r_s) untuk korelasi sederhana dan Korelasi Konkordansi Kendall

untuk korelasi berganda (secara bersama-sama/keseluruhan). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal (jenjang).

Alat analisis yang dipakai adalah sebagai berikut :

a. Korelasi Ranking Tau Kendall

Korelasi ini digunakan untuk menunjukkan atau mengetahui apakah cukup kuat atau beralasan bagi kita untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\sum S}{\frac{1}{2} n (n - 1)}$$

apabila terdapat nilai yang sama, maka memakai rumus :

$$r = \frac{\sum S}{\sqrt{\frac{1}{2} n (n - 1) - T_x} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} n (n - 1) - T_y}}$$

$$T_x : \frac{1}{2} V t (t - 1)$$

$$T_y : \frac{1}{2} V t (t - 1)$$

Keterangan :

S = Jumlah banyaknya rank yang lebih besar

n = Banyaknya pasangan data

= Korelasi Tau Kendal

UPT-PUSTAK-UNDIP

R_{xi} = Rangking dari variabel X

R_{yi} = Rangking dari variabel Y

t = Jumlah macam rangking yang berada dalam nilai pengamatan yang sama

Menurut Sutrisno Hadi (1990:275), interpretasi koefisien korelasi untuk mengetahui nilai "r" tinggi atau rendah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

* 0,00 – 0,19 = sangat rendah

* 0,20 – 0,39 = rendah

* 0,40 – 0,59 = sedang

* 0,60 – 0,79 = kuat

* 0,80 – 0,100 = sangat kuat

Pengujian Hipotesis

Menentukan formulasi H_0 dan H_a

$H_0 : r = 0$: tidak ada hubungan antara variabel bebas Xi dengan variabel terikat Y

$H_a : r \neq 0$: ada hubungan antara variabel bebas Xi dengan variabel terikat Y

Keterangan :

X-1 = Sumber-sumber Daya

X-2 = Struktur Intern

X-3 = Kaitan-kaitan Yang Memungkinkan

Y = Pelembagaan BPD

Memilih taraf nyata dan menentukan derajat kebebasan, dengan taraf nyata 0,05 atau tingkat kepercayaan 95 % dan derajat kebebasan $(dk):n-2$.

Uji signifikansi :

$$Z = \frac{r}{\sqrt{(4n + 10) / (9n^2 - 9n)}}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi Tau Kendall

N = banyaknya responden

Kesimpulan :

Jika $Z > Z_{0,025}$, maka H_0 ditolak.

b. Korelasi Berganda

Perhitungan korelasi berganda menggunakan koefisien konkordansi Kendall

(W) dengan rumus sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{\{ 1/12 k^2 (n^3 - n) \} - k \sum T}$$

Chi-Square Test

Apabila terdapat nilai pengamatan yang sama maka rs memakai rumus :

atau rumus lain yang sama dengan rumus di atas, yang ditulis di

$$W = \frac{S}{\{ 1/12 k^2 (n^3 - n) \} - k \sum T}$$

Keterangan :

- S = $\sum Ri - (Ri)^2 / n$
- R = jumlah rangking
- k = Banyaknya variabel yang dikorelasikan
- n = Banyaknya kolom (ulangan)
- T = $(\sum t^2 - t) / 12$

Uji signifaksi W, yaitu :

$$X^2 = k(n-1)W$$

Keterangan :

- X² = Chi Square
- k = Variabel
- n = jumlah variable

Kaidah : tolak Ho jika X² > X² a (n-1)

3.4.3. c. Korelasi Parsial

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel independen dengan variabel dependen, dimana salah satu variabel independennya dikendalikan atau dibuat tetap. Perhitungan korelasi parsial

digunakan rumus :

$$R_{xy1.x2} = \frac{r_{yx1} - r_{yx2}.r_{x1x2}}{\sqrt{1-r_{x1x2}^2} \sqrt{1-r_{yx2}^2}}$$

Adapun uji signifikansi koefisien korelasi parsial dapat dihitung dengan rumus :

$$t = \frac{r_p \sqrt{n-3}}{1-r_p}$$

Keterangan:

r_p = korelasi parsial yang ditemukan

n = jumlah sampel

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel tergantung dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi yang ditemukan (R^2). Jika R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan

menunjukkan semakin besar (mendekati satu), variabel tergantung semakin besar. Maka sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi nilai variabel tergantung semakin besar. Sebaliknya jika R menunjukkan semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi nilai variabel tergantung semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variabel tergantung. Secara umum dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi berganda (R) berada antara 1 dan atau $0 < R < 1$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

A. 1. Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Kecamatan Sayung yang terletak berbatasan dengan wilayah Kota Madya Semarang, merupakan wilayah dataran rendah yang terletak di pantai utara Jawa Tengah paling barat dan berada di ketinggian 0 sampai dengan 3 meter dari permukaan laut dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis, yang beribukota di Desa Purwosari. Secara administratif Kecamatan Sayung terbagi atas

20 (dua puluh) desa dengan batas administratif meliputi

- Sebelah Utara : Laut Jawa

- Sebelah Timur : Kecamatan Karang Tengah

- Sebelah Selatan : Kecamatan Mranggen

- Sebelah Barat : Kodya Semarang

Luas Kecamatan Sayung adalah 7869,0 ha dengan rincian dari Timur ke Barat \pm 8 km dan dari Utara ke Selatan dengan jarak \pm 16 km, dan jarak tempuh ke kota Kabupaten Demak \pm 16 km.

Menurut data statistik Kantor Kecamatan Sayung Tahun 2002 jumlah penduduk di Kecamatan Sayung saat ini sebanyak 21.848 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 88.927 orang yang tersebar di 20 desa. Eaju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sayung mencapai 1,52 % per tahun. Pada Tahun 2001 penduduk usia

produktif atau angkatan kerja (10 tahun keatas) berjumlah 63.853 jiwa, yang terdiri atas 31.695 jiwa laki-laki dan 32.158 perempuan. Dari jumlah tersebut tercatat 36.711 jiwa telah bekerja. Sedangkan sisanya dalam taraf mencari pekerjaan dan penduduk bukan angkatan kerja.

Lapangan usaha penduduk Kecamatan Sayung meliputi sektor pertanian sekitar 20.793 jiwa, nelayan 244 jiwa, karyawan pabrik 5.198 jiwa, buruh bangunan 2.826 jiwa, pedagang 3.430 jiwa, angkutan 873 jiwa, pegawai negeri/ABRI 1.073 jiwa, pensiunan 255 jiwa, dan lainnya 857 jiwa.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin selama lima tahun terakhir hampir seimbang. Jumlah penduduk perempuan tiap tahunnya selalu lebih besar dari jumlah penduduk laki-lakinya (sex ratio per 100), sedangkan sex ratio pada tahun 2001 sebesar 98,62 % yang berarti penduduk perempuannya lebih banyak dari penduduk laki-lakinya.

Kepadatan penduduk di masing-masing desa menunjukkan ketidakmerataan. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan potensi masing-masing wilayah desa yang tidak sama. Makin padat penduduk cenderung di pusat kota Kecamatan dan daerah perkotaan, di mana banyak terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai bidang usaha yang dapat memberikan lapangan pekerjaan seperti perdagangan, industri, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya.

Di Kecamatan Sayung untuk Tahun 2001 mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.130 jiwa per Km, Desa Sriwulan merupakan Desa yang mempunyai angka

kepadatan tertinggi yaitu sebesar 3.371 jiwa per Km, sedangkan yang terendah adalah Desa Surodadi dengan kepadatan penduduk sebesar 518 jiwa per Km.

Sedangkan jumlah penduduk menurut pendidikan yang pernah ditamatkan di Kecamatan Sayung terdiri dari: Lulus SD sebanyak 10.161 orang, lulus SLTP sebanyak 4.953 orang, lulus SLTA sebanyak 4.260 orang, dan lulus Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 312 orang.

A. 2. Gambaran Umum BPD Kecamatan Sayung

BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat isdiadat, membuat Peraturan Desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa (Pemdes). Dalam pembentukan BPD setiap desa tidak sama jumlah anggotanya, karena disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada di desa masing-masing. Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dipilih dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi-organisasi sosial politik, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut diatas Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang keanggotaannya dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat desa.

Setelah Badan Perwakilan Desa (BPD) terbentuk, maka Kepala Desa membuat Berita Acara kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan,

yang selanjutnya Bupati mengeluarkan Surat Keputusan kepada anggota BPD yang terpilih.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari BPD harus berlandaskan pada suatu aturan yang dibuat dan disepakati bersama anggota, aturan yang dimaksud adalah Tata Tertib (Tatib). Berlandaskan Tata Tertib itulah BPD menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari, baik yang berhubungan dengan masyarakat, dengan Pemerintah Desa maupun dengan Lembaga-Lembaga lain yang ada di Desa. Tanpa menggunakan aturan yang baku, maka BPD akan berjalan semauinya dan tidak tahu dimana BPD harus berjalan di rel yang harus dilaluinya.

BPD Kecamatan Sayung dilantik pada tanggal 31 Oktober 2001. Sejak saat itulah BPD yang ada di Kecamatan Sayung secara yuridis formal menjadi suatu lembaga yang sah keberadaannya di desa. Dari 20 Desa yang ada di Kecamatan Sayung jumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) berjumlah 242 orang. Dari jumlah tersebut jumlah keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) masing-masing desa tidak sama disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing desa, sehingga ada desa yang jumlah anggota BPD-nya 9 orang, ada yang 11 orang dan ada yang berjumlah 13 orang. Berikut disampaikan data tentang jumlah keanggotaan BPD pada masing-masing desa berdasarkan catatan di Kantor Kecamatan Sayung:

nama desa, jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah anggota BPD, dan jumlah penduduk per anggota BPD

nama desa, jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah anggota BPD, dan jumlah penduduk per anggota BPD

nama desa, jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah anggota BPD, dan jumlah penduduk per anggota BPD

Tabel IV.1. Nama Desa dan Jumlah Anggota BPD di Kec. Sayung

No	Nama Desa	Jumlah Anggota BPD
1	Bedono	13 orang
2	Purwosari	13 orang
3	Timbulseloko	13 orang
4	Loireng	11 orang
5	Prampelan	13 orang
6	Tambakroto	9 orang
7	Pilangsari	9 orang
8	Sriwulan	13 orang
9	Banjarsari	13 orang
10	Sidogemah	13 orang
11	Bulusari	13 orang
12	T u g u	13 orang
13	Dombo	11 orang
14	Karangasem	13 orang
15	Sayung	13 orang
16	Surodadi	9 orang
17	Jetaksari	13 orang
18	Gemulak	11 orang
19	Kalisari	13 orang
20	Sidorejo	13 orang
	Jumlah	242 orang

Sumber : Kantor Kecamatan Sayung Tahun 2002

Tabel IV.2. Jumlah anggota BPD Kecamatan Sayung dan Tingkat Pendidikan

Jumlah Desa	Jumlah anggota BPD	Tingkat Pendidikan Anggota BPD					
		SMP	%	SMA	%	SARJANA	%
20 Desa	242 orang	198	81,8	32	13,2	12	5

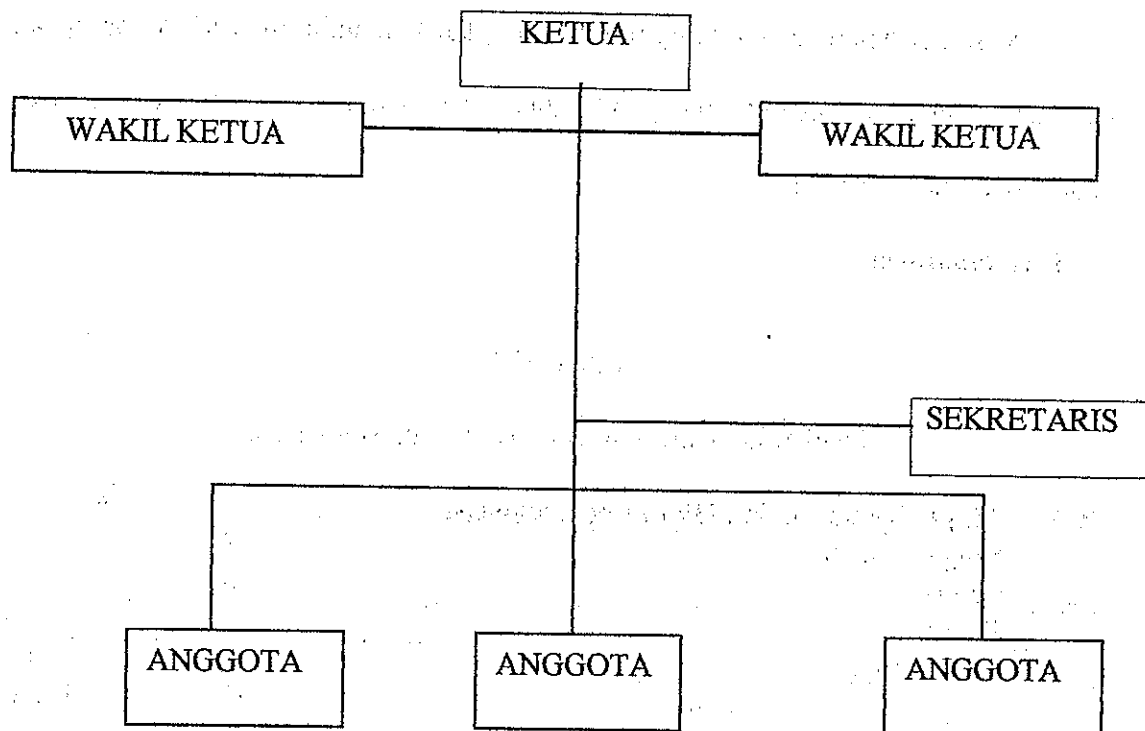
Sumber : Kantor Kecamatan Sayung Tahun 2002

Berdasarkan tabel tersebut diatas menyebutkan bahwa anggota BPD yang berpendidikan SMP mencapai 81,8 %, yang berpendidikan SMA hanya 13,2 % dan yang berpendidikan Sarjana hanya 5 %. Dari jumlah prosentase tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan anggota BPD di Kecamatan Sayung kurang memadai jika dibandingkan dengan beban tugas dan fungsi yang diembannya, sehingga masih perlu dikembangkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Adapun struktur dari Badan Perwakilan Desa (BPD) secara umum yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada PERDA Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2000 adalah terdiri dari :

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris BPD
- Anggota

Gambar 4.1. Struktur Badan Perwakilan Desa (BPD)



Sumber : Perda Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2000

B. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil jawaban dari 40 responden atas 54 pertanyaan tentang pelebagaan Badan Perwakilan Desa di Kecamatan Sayung, yang meliputi variabel pelebagaan, variabel sumber-sumber daya, variabel struktur intern dan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) diperoleh hasil sebagai berikut :

B.1. VARIABEL PELEMBAGAAN

Variabel pelebagaan yang meliputi tingkat kemandirian BPD, kemampuan BPD dan tingkat dukungan terhadap BPD diperoleh hasil sebagaimana yang terdapat pada tabel-tabel dibawah ini :

1. Kemandirian

Tabel IV.3

Tingkat kemandirian BPD dalam fungsi legislasi

NO	Tingk. Kemandirian Dlm Fungsi legislasi	F	%
1	Sangat rendah	8	20.0
2	Rendah	16	40.0
3	Tinggi	16	40.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
Total		40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 1

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Joko Staf Pemerintahan Kantor Kecamatan Sayung pada tanggal 15 November 2002 menyebutkan bahwa, BPD sebagai lembaga legislatif desa minimal dalam satu tahun wajib membuat tiga Peraturan Desa. Yaitu, Perdes tentang lelang Bando Desa, Perdes tentang RAPBDES, dan Perdes tentang Laporan Pertanggung jawaban Lurah Desa. Bila kita kaitkan dengan tabel di atas bahwa 20 % responden menyatakan sangat rendah itu berarti BPD belum melaksanakan tugas dan fungsinya sama sekali sebagai lembaga legislatif desa, dan 40 % responden menjawab rendah, artinya BPD hanya memenuhi standar minimal dalam melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga legislatif yaitu hanya membuat ketiga Perdes tersebut di atas. Sedangkan 40 % responden menjawab tinggi

yang berarti BPD sudah dapat membuat peraturan-peraturan lain disamping membuat ketiga Perdes tersebut di atas.

Tabel IV.4

Tingkat kemandirian BPD dalam fungsi pengawasan

NO	Tingk. Kemandirian dalam Pengawasan	F	%
1	Sangat rendah	4	10.0
2	Rendah	20	50.0
3	Tinggi	16	40.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 2

Mencermati kemandirian BPD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa, 50,0 % responden menjawab rendah. Artinya, BPD hanya baru dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa sebagian saja, yaitu pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program desa, sedangkan pengawasan tentang keuangan desa BPD belum sepenuhnya dapat melaksanakannya, karena disamping belum adanya ketrampilan khusus tentang keuangan juga karena pengawasan keuangan desa masih menjadi wewenang dari Bawasda. Sedangkan 10,0 % responden menjawab sangat rendah. Artinya, BPD dalam fungsi pengawasan belum berfungsi sama sekali, hal ini disebabkan karena rendahnya dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Desa.

2. Kemampuan BPD

Tabel IV.5

Kemampuan BPD dalam menyerap aspirasi

NO	Tingk. Kemampuan menyerap aspirasi	F	%
1	Sangat rendah	8	20.0
2	Rendah	18	45.0
3	Tinggi	14	35.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
Total		40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 3

Kemampuan BPD dalam menyerap aspirasi dari masyarakat seperti pendapat yang disampaikan oleh responden di atas, menyebutkan 45,0 % responden menjawab rendah. Artinya, kemampuan BPD dalam menyerap aspirasi dari masyarakat belum optimal, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh anggota BPD, kurang peka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan jarang melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, sehingga BPD tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan 20,0 % responden menjawab sangat rendah, yang artinya bahwa BPD tidak ada kegiatan sama sekali dalam menyerap aspirasi masyarakat, baik melalui pertemuan-pertemuan maupun lewat kegiatan yang sifatnya informal.

Tabel IV.6

Kemampuan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat

NO	Tingk. Kemampuan menyalurkan aspirasi	F	%
1	Sangat rendah	6	15,0
2	Rendah	27	67,5
3	Tinggi	7	17,5
4	Sangat tinggi	0	0,0
	Total	40	100,0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 4

Berdasarkan tabel di atas, bahwa kemampuan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa masih rendah, padahal itu merupakan tugas yang penting dan utama yang harus dilakukan oleh BPD. Terbukti 67,5 % responden menjawab rendah. Artinya, aspirasi dari masyarakat belum sepenuhnya dapat dibahas dan dipecahkan dalam musyawarah desa, karena ketrampilan bermusyawarah yang dimiliki oleh anggota BPD masih rendah, sehingga untuk mengutarakan pendapat secara baik dan benar belum bisa. Sedangkan 15,0 % responden menjawab sangat rendah, yang artinya aspirasi dari masyarakat hanya ditampung saja tanpa adanya suatu pembahasan lebih lanjut, karena BPD sendiri dalam keadaan fakum (tidak mempunyai kegiatan).

Tabel IV.7
Kemampuan BPD berhubungan dengan masyarakat desa

NO	Tingk. Kemampuan berhubungan dengan masyarakat	F	%
1	Sangat rendah	6	15.0
2	Rendah	26	65.0
3	Tinggi	8	20.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 5

Kemampuan BPD dalam melakukan hubungan dengan masyarakat yang ada di desa juga masih rendah. Dari 40 responden 65,0 % menjawab rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan BPD dengan masyarakat belum dapat berjalan dengan baik. Artinya, BPD jarang sekali melakukan hubungan dengan masyarakat baik lewat rapat-rapat di tingkat RT, maupun lewat forum-forum informal yang ada di desa, misalnya acara kegiatan agama, atau kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga hubungan BPD dengan masyarakat kurang harmonis. Sedangkan 15 % responden menjawab sangat rendah, itu artinya BPD tidak melakukan hubungan sama sekali dengan masyarakat, baik secara formal maupun informal.

3. Dukungan

Tabel IV.8
Dukungan masyarakat kepada BPD

NO	Tingk. Dukungan masy. Terhadap BPD	F	%
1	Sangat rendah	8	20.0
2	Rendah	30	75.0
3	Tinggi	2	5.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 6

Dukungan masyarakat terhadap keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) ternyata masih rendah sekali. 75,0 % responden menjawab rendah. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum mengetahui apa sebenarnya Badan Perwakilan Desa (BPD) itu, dan untuk apa BPD itu hadir di desanya. Sehingga masyarakat kurang mendukung adanya program-program yang dibuat oleh BPD. Sedangkan 5,0 % responden yang menjawab tinggi. Artinya, masyarakat mulai mengetahui bahwa BPD adalah sebagai wakil mereka di desa, sehingga masyarakat mulai mendukung program-program yang dibuat oleh BPD.

Tabel IV.9
Dukungan Pemerintah Daerah kepada BPD

NO	Tingkat dukungan Pemda	F	%
1	Sangat rendah	8	20.0
2	Rendah	28	70.0
3	Tinggi	4	10.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
Total		40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 7

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap BPD terlihat masih rendah sekali. Seperti yang ada di tabel di atas 70,0 % responden menjawab rendah. Artinya, dukungan yang diterima oleh BPD dari Pemerintah Daerah belum ada, baik dukungan yang bersifat materi maupun yang non materi. Misalnya, dana, peralatan, buku-buku atau pelatihan-pelatihan terhadap BPD. Sedangkan 10,0 % responden menjawab tinggi, yang berarti telah mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah. Seperti yang

dialami oleh BPD Desa Purwosari yang mendapat pelatihan-pelatihan khusus dalam rangka Pemilihan Kepala Desa.

Tabel IV.10:
Pemberdayaan Pemerintah Daerah kepada BPD

NO	Tingkat Pemberdayaan Pemda	F	%
1	Sangat rendah	20	50.0
2	Rendah	18	45.0
3	Tinggi	2	5.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 8

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap para anggota BPD masih rendah sekali, terbukti 50,0 % responden mengatakan sangat rendah. Artinya, bahwa Pemerintah Daerah selama ini belum pernah melakukan pemberdayaan terhadap para anggota Badan Perwakilan Desa (BPD). Sedangkan 5.0 % mengatakan tinggi, yang artinya ada BPD yang sudah mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah. Misalnya, BPD Bedono yang menerima pemberdayaan dalam proyek lingkungan hidup di desanya.

B. 2. VARIABEL SUMBER-SUMBER DAYA

Variabel sumber-sumber daya yang meliputi sumber daya manusianya (SDM), besarnya sumber dana yang dimiliki BPD, kondisi fisik yang dimiliki oleh BPD (termasuk peralatan kantor dan kondisi kantor yang dimilikinya), dari jawaban

responden dapat diperoleh hasil sebagaimana yang terdapat pada tabel-tabel dibawah ini :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel IV.11
Dukungan pendidikan formal

NO	Dukungan Pendidikan Formal	F	%
1	Tidak mendukung	2	5.0
2	Kurang mendukung	10	25.0
3	Mendukung	26	65.0
4	Sangat mendukung	2	5.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 11

Dukungan pendidikan formal yang dimiliki oleh anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) berdasarkan tabel di atas 65,0 % menyatakan mendukung. Meskipun rata-rata pendidikan formal yang dimiliki oleh anggota BPD Sayung adalah SLTP, karena untuk menjadi anggota BPD minimal harus berijazah SLTP, maka mereka menganggap bahwa pendidikan formal yang mereka miliki mendukung tugas dan fungsi yang diembannya. Sedangkan 5,0 % responden menyatakan tidak mendukung, artinya pendidikan formal yang mereka miliki belum tentu dapat membantu pekerjaannya, tanpa diikuti dengan pendidikan informal atau pengalaman-pengalaman tentang keorganisasian.

Tabel IV. 12 Dukungan pendidikan informal

NO	Dukungan Pendidikan Informal	F	%
1	Tidak mendukung	4	10.0
2	Kurang mendukung	32	80.0
3	Mendukung	4	10.0
4	Sangat mendukung	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 13

Pendidikan informal yang dimiliki oleh anggota BPD di Kecamatan Sayung berdasarkan tabel di atas 80,0 % mengatakan kurang mendukung. Artinya, pendidikan informal yang dimiliki bila diterapkan dan dipakai untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota BPD tidak sesuai, karena BPD adalah merupakan organisasi baru di desa yang menuntut para anggotanya mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan desa, peraturan-peraturan desa dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa. Sedangkan 10,0 % responden mengatakan mendukung. Artinya, ada BPD yang pendidikan informalnya dapat dipakai untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD.

Tabel IV. 13 Kemampuan BPD menyusun program kerja

NO	Tingk. Kemampuan menyusun Program Kerja	F	%
1	Sangat rendah	6	15.0
2	Rendah	16	40.0
3	Tinggi	18	45.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 15

Kemampuan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung dalam menyusun Program Kerjanya 45,0 % responden menjawab tinggi, artinya BPD ini sudah dapat menyusun program kerjanya meskipun belum maksimal. Misalnya, program kerja jangka pendek, program kerja jangka menengah, perogram kerja jangka panjang, walaupun akhirnya program-program kerja yang dibuat tersebut tidak dapat direalisasikan. Sedangkan 15,0 % responden menyatakan sangat rendah. Artinya, ada BPD yang belum menyusun program kerjanya sama sekali. Misalnya, BPD desa Kalisari. (menurut catatan Kantor Kecamatan Sayung)

Tabel IV. 14

Kemampuan BPD merealisasikan rencana program

NO	Tingk. Kemampuan merealisasikan Rencana Kerja	F	%
1	Sangat rendah	6	15.0
2	Rendah	28	70.0
3	Tinggi	6	15.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
Total		40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 17

Berdasarkan tabel di atas kemampuan BPD Kecamatan Sayung dalam merealisasikan program kerjanya 70,0 % responden menjawab rendah. Artinya, mereka hanya mampu membuat rencana kerja saja, tetapi tidak mampu merealisasikan rencana kerja tersebut, hal ini disebabkan rendahnya kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa dan dengan masyarakat. Sedangkan 15,0 % responden ada yang menjawab tinggi, yang artinya ada BPD yang sudah dapat merealisasikan

rencana programnya. Misalnya, adanya rapat bulanan, rapat rutin dengan Pemerintah Desa juga berjalan, dan kunjungan ke RT.

2. Sumber Dana

Tabel IV. 15

Jumlah dana yang dimiliki BPD :

NO	Jumlah dana yang dimiliki	F	%
1	Tidak memadai	12	30.0
2	Kurang memadai	22	55.0
3	Memadai	6	15.0
4	Sangat memadai	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 18

Sumber dana yang dimiliki masing-masing desa memang tidak sama, artinya ada desa yang memiliki dana yang cukup ada yang kurang, sebab dana yang dimiliki oleh BPD didasarkan besar kecilnya bondo desa yang dimiliki oleh desa tersebut. Sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2000, bahwa sumber dana BPD diperoleh dari 10 % hasil lelang Bando Desa. Berdasarkan jawaban responden di atas bahwa dana yang dimiliki oleh BPD di Kecamatan Sayung 55,0 % responden menyatakan kurang memadai. Artinya, dana yang diterima dari desa sangat kecil, sehingga untuk biaya operasional dalam satu tahun masih kurang, apalagi ditambah dengan biaya untuk rapat-rapat, hal ini disebabkan karena bondo desa yang dimiliki oleh desa sangat minim. Sedangkan 15,0 % responden mengatakan memadai, karena bondo desa yang dimiliki oleh desa besar/banyak, maka pembagian dana untuk BPD juga besar, sehingga cukup untuk biaya rapat dan operasionalnya dalam satu tahun.

Tabel IV. 16

Kecukupan dana BPD untuk operasional

NO	Tingkat kecukupan dana	F	%
1	Tidak cukup	10	25.0
2	Kurang cukup	22	55.0
3	Cukup	6	15.0
4	Sangat cukup	2	5.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 20

Berdasarkan table di atas 55,0 % responden mengatakan kurang cukup. Artinya, kalau dana yang diperoleh dari desa itu sangat kecil maka jelas dana tersebut kurang untuk operasionalnya dalam satu tahun, apalagi ditambah dengan uang rapat dan lain-lain. Sedangkan 5,0 % responden mengatakan sangat cukup, karena dana yang diterima dari desa cukup besar, sehingga untuk biaya operasionalnya dalam satu tahun sudah cukup.

Tabel IV. 17

Kesesuaian sumberdana dengan harapan

NO	Tingkat kesesuaian sumber dana	F	%
1	Tidak sesuai	8	20.0
2	Kurang sesuai	32	80.0
3	Sesuai	0	0.0
4	Sangat sesuai	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 22

Untuk kesesuaian sumber dana yang diperoleh dengan harapan para anggota BPD dan dengan tugas yang diembannya 80,0 % responden menyatakan kurang sesuai, karena harapan mereka paling tidak dana yang diterima itu cukup untuk biaya

operasional dalam satu tahun termasuk biaya rapat-rapat. Sedangkan 20,0 % responden menyatakan tidak sesuai. Karena mereka memang tidak mendapatkan dana sedikitpun dari desa, sebab desa sendiri bondo desanya 0,0 %. Seperti Desa Karangasem dan Desa Kalisari.

3. Kondisi Fisik (kantor)

Tabel IV. 18
Kualitas perlengkapan kantor BPD

NO	Kualitas perlengkapan kantor BPD	F	%
1	Tidak berkualitas	8	20.0
2	Kurang berkualitas	32	80.0
3	Berkualitas	0	0.0
4	Sangat berkualitas	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No.23

Dalam hal perlengkapan kantor yang dimiliki oleh BPD di Kecamatan Sayung 80,0 % responden menjawab kurang berkualitas. Artinya, perlengkapan kantor yang dimiliki oleh BPD sudah ketinggalan zaman. Misalnya, mesin ketik yang merupakan bekas dari Pemerintah Desa, meja kursi yang juga kondisinya sudah jelek, bahkan kantornya sendiri masih pinjam dengan Pemerintah Desa. sedangkan 20,0 % responden menjawab tidak berkualitas, yang artinya BPD belum mempunyai perlengkapan kantor sama sekali, baik itu mesin ketik, maupun perlengkapan kantor yang lainnya.

Tabel IV. 19
Kelengkapan kantor BPD

NO	Tingk. Kelengkapan kantor	F	%
1	Tidak memadai	8	20.0
2	Kurang memadai	24	60.0
3	Memadai	8	20.0
4	Sangat memadai	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 24

Dalam hal kelengkapan kantor yang dimiliki oleh BPD yang ada di Kecamatan Sayung 60,0 % mengatakan kurang memadai artinya peralatan kantor yang dimilikinya hanya sekedar meja kursi saja. Sedangkan 20,0 % menyatakan memadai, artinya BPD sudah memiliki perlengkapan kantor meskipun sangat sederhana diantaranya meja kursi, almari dan rak penyimpanan buku-buku.

A. 3. VARIABEL STRUKTUR INTERN

Variabel struktur intern yang meliputi pembagian kerja anggota BPD, departementalisasi BPD, rentang kendali, dan kejelasan wewenang yang ada pada BPD dapat diperoleh hasil sebagaimana yang ada pada tabel-tabel dibawah ini :

1. Pembagian Kerja

Tabel IV. 20
Kejelasan pembagian kerja anggota BPD

NO	Kejelasan Pembagian kerja	F	%
1	Tidak jelas	8	20.0
2	Kurang jelas	28	70.0
3	Jelas	2	5.0
4	Sangat jelas	2	5.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 25

Kejelasan pembagian kerja bagi anggota BPD memang dirasakan masih kurang jelas, bahkan terkesan tidak jelas, sehingga banyak anggota BPD yang bingung dengan apa yang harus dikerjakan. Seperti yang disebutkan dalam tabel di atas, 70,0 % responden menyatakan kurang jelas. Artinya, pembagian tugas yang ada pada BPD kurang jelas, misalnya belum adanya kejelasan pembagian tugas bagi anggota BPD, sehingga masing-masing anggota tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Sedangkan 5,0 % responden menyatakan sangat jelas. Artinya, masing-masing sudah mendapatkan pembagian tugas yang jelas. Contoh : bidang kesra, bidang Pemerintahan, bidang sosial dan lain sebagainya. Sehingga, mereka tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan.

Tabel IV. 21
Kesesuaian pembagian kerja

NO	Kesesuaian Pembagian Kerja	F	%
1	Tidak sesuai	6	15.0
2	Kurang sesuai	30	75.0
3	Sesuai	4	10.0
4	Sangat sesuai	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 26

Berdasarkan table di atas kesesuaian pembagian kerja yang ada pada BPD di Kecamatan Sayung menyebutkan 75,0 % responden menjawab kurang sesuai. Artinya, karena belum ada pembagian tugas yang jelas, maka ketrampilan yang mereka miliki kurang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sedangkan 10,0 % responden menjawab sesuai, karena masing-masing anggota telah mendapatkan

pembagian tugas yang sesuai dengan bidangnya, maka pembagian kerja tersebut menurut mereka sesuai dengan ketrampilan yang mereka miliki.

Tabel IV. 22
Tingkat beban pekerjaan

NO	Tingkat beban pekerjaan	F	%
1	Sangat berat	12	30.0
2	Berat	26	65.0
3	Ringan	2	5.0
4	Sangat ringan	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 27

Karena tidak adanya kejelasan tugas yang diembannya, maka anggota BPD merasakan bahwa mereka merasakan ada beban yang berat terhadap pekerjaannya, karena mereka harus melakukan semua pekerjaan tanpa ada pembagian yang jelas kepada mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa beban pekerjaan yang dibebankan kepada mereka itu sangat berat sekali, Sebagaimana yang disampaikan 65,0 % responden di atas. Sedangkan 5,0 % responden mengatakan ringan, karena mereka mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya, sehingga pekerjaan mereka menjadi ringan.

2. Departementalisasi

... yang pemerintah desa sebagai ...

Tabel IV. 23
Tingkat keberagaman pekerjaan BPD

NO	Tingkat keberagaman pekerjaan	F	%
1	Sangat rendah	6	15.0
2	Rendah	14	35.0
3	Tinggi	18	45.0
4	Sangat tinggi	2	5.0
Total		40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 28

Memang banyak pekerjaan yang dilakukan oleh BPD di desa, dan masing-masing desa juga tidak sama, apalagi desa yang banyak bangunannya. Seperti yang disampaikan responden pada tabel di atas. 45,0 % responden mengatakan tinggi. Artinya, pekerjaan yang harus diselesaikan di desa sangat beragam, baik itu permasalahan yang berhubungan dengan kemasyarakatan maupun masalah yang berhubungan dengan pembangunan fisik. Dan 5,0 % responden mengatakan sangat tinggi, yang artinya pekerjaan yang mereka hadapi sangat beragam sekali.

Tabel IV. 24
Tingkat kesamaan pekerjaan BPD

NO	Tingkat kesamaan pekerjaan	F	%
1	Sangat rendah	12	30.0
2	Rendah	28	70.0
3	Tinggi	0	0.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
Total		40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 29

Karena memang tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh BPD di desa itu sangat beragam sekali, maka tingkat kesamaan pekerjaan anggota BPD rendah

(tidak ada). Hal ini seperti yang disampaikan oleh responden di atas, 70,0 % responden mengatakan rendah dan 30,0 % responden mengatakan sangat rendah. Artinya, tingkat kesamaan pekerjaan BPD antara satu desa dengan desa yang lainnya tidak sama, ada tingkat pekerjaannya tinggi dan ada tingkat pekerjaannya rendah, tergantung program yang ada di desanya.

3. Rentang Kendali

Tabel IV. 25

Kesesuaian jumlah anggota BPD

NO	Kesesuaian Jml.anggota BPD	F	%
1	Tidak sesuai	0	0.0
2	Kurang sesuai	14	35.0
3	Sesuai	26	65.0
4	Sangat sesuai	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No.30

Jumlah keanggotaan BPD itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maupun dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa jumlah keanggotaan BPD disesuaikan dengan jumlah penduduk desa yang ada pada waktu pemilihan. Sehingga 65,0 % responden menjawab sesuai, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi ada juga yang menjawab kurang sesuai yaitu 35,0 % responden, karena banyaknya persoalan yang harus diselesaikan oleh BPD di desa, maka dari jumlah anggota yang dimilikinya dirasa kurang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di desa.

Tabel IV. 26
Pola hubungan BPD

NO	Pola hubungan dengan Pimpinan	F	%
1	Tidak baik	2	5.0
2	Kurang baik	16	40.0
3	Baik	18	45.0
4	Sangat baik	4	10.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 31

BPD adalah lembaga yang demokratis yang ada di desa, sehingga setiap pengambilan suatu kebijakan harus dilakukan dengan jalan musyawarah, hubungan yang harmonis antara pimpinan dan anggota akan terjalin bila lembaga itu sering melakukan pertemuan, begitu sebaliknya, bila lembaga itu jarang melakukan pertemuan, maka hubungan antara pimpinan dengan anggota tidak akan harmonis. Dari data di atas yang menyebutkan bahwa pola hubungan antara pimpinan dengan anggota yang harmonis adalah 45,0 % responden. Sedangkan 5,0 % responden mengatakan tidak baik, karena mereka tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan, sehingga hubungan mereka baik dengan pimpinan maupun antar anggota kurang harmonis.

Tabel IV. 27
Frekuensi pertemuan BPD

NO	Frekuensi pertemuan dg. Pimpinan	F	%
1	Sangat jarang	2	5.0
2	Jarang	24	60.0
3	Sering	12	30.0
4	Sangat sering	2	5.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 34

Karena setiap keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah, maka kontak antara pimpinan dengan anggota dilakukan apabila ada pertemuan itu saja. Semakin sering pertemuan yang dilakukan, maka semakin sering kontak antara pimpinan dengan anggota, begitu sebaliknya, semakin jarang pertemuan yang dilakukan, maka semakin jarang pula kontak antara pimpinan dengan anggota. Berdasarkan table di atas 60,0 % responden mengatakan jarang. Artinya, mereka melakukan pertemuan dengan pimpinan kalau ada acara rapat diluar itu mereka jarang melakukan kontak. Sedangkan 5,0 % responden mengatakan sangat sering. Artinya, kontak dengan pimpinan selain mereka lakukan kalau ada rapat juga dilakukan diluar rapat (acara-acara yang bersifat informal).

4. Kejelasan wewenang

Tabel IV. 28
Kejelasan wewenang anggota BPD

NO	Kejelasan wewenang organisasi	F	%
1	Tidak	30	75.0
4	Ya	10	25.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 35

Kebanyakan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsi itu dilakukan secara bersama-sama baik oleh semua anggota dan pimpinan, dan hanya sedikit wewenang yang diberikan oleh para anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya, itupun dalam hal-hal tertentu, misalnya pembentukan Tim Khusus atau Panitia Khusus, sehingga jarang sekali wewenang itu dimiliki atau diberikan oleh pimpinan kepada anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seperti yang terbukti pada

data di atas menyebutkan bahwa 75,0 % responden menjawab tidak ada wewenang, dan 25,0 % responden menjawab ada wewenang.

Partisipasi anggota BPD dalam pengambilan keputusan

Tabel IV. 29
Partisipasi anggota BPD dalam pengambilan keputusan

NO	Tingkat partisipasi anggota BPD	F	%
1	Sangat rendah	2	5.0
2	Rendah	22	55.0
3	Tinggi	12	30.0
4	Sangat tinggi	4	10.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 36

Partisipasi anggota BPD dalam pengambilan suatu keputusan memang sangat penting dan sangat diharapkan sekali, karena semakin tinggi partisipasi anggota BPD dalam pengambilan keputusan, maka semakin baik keputusan yang ditetapkan, dan begitu sebaliknya. Tetapi rupanya partisipasi anggota BPD yang ada di Kecamatan Sayung dalam pengambilan keputusan masih rendah. Terbukti data di atas menyebutkan 55,0 % responden menjawab rendah. Artinya, sering kali anggota BPD dalam rapat mereka hanya datang dan mendengarkan saja, tanpa ikut berbicara. Sehingga keputusan yang mereka ambil kadang-kadang mereka sendiri tidak paham. Sedangkan 5,0 % responden mengatakan sangat rendah, itu berarti BPD tidak ada kegiatan sama sekali, sehingga tidak ada satu keputusanpun yang diambil.

B. 4. VARIABEL KAITAN-KAITAN YANG MEMUNGKINKAN

Variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) meliputi kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BPD; kerja sama BPD dengan

Pemerintah Desa, keterkaitan BPD dengan Partai Politik, dan kerja sama BPD dengan lembaga-lembaga lain yang ada di desa, diperoleh hasil sebagaimana yang terdapat pada tabel-tabel dibawah ini:

1. Kewenangan yang diberikan oleh Pemda

Tabel IV. 30
Kewenangan terhadap Lurah Desa

NO	Kewenangan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa	F	%
1	Tidak	10	25.0
4	Ya	30	75.0
	Total	40	100.0

Sumber: Jawaban pertanyaan No. 37

Dalam pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa, memang BPD diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 09 Tahun 2000, walaupun kenyataannya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah itu belum sepenuhnya diberikan kepada BPD dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa. Berdasarkan tabel di atas 75,0 % responden menjawab "ya". Artinya, berdasarkan ketentuan yang ada kenyataannya mereka diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa. Sedangkan 25,0 % mengatakan "tidak", karena mereka merasakan bahwa kewenangan yang diberikan itu tidak sepenuhnya.

Tabel IV. 31

Kewenangan terhadap Pamong desa

NO	Kewenangan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa	F	%
1	Tidak	10	25.0
4	Ya	30	75.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No.38

Seperti halnya pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa, kewenangan juga diberikan kepada BPD oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa, sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam Perda Nomor 10 Tahun 2000, itupun juga belum sepenuhnya diberikan kepada BPD. Terbukti dari 40 responden 75,0 % diantaranya menjawab "ya" dan 25,0 % responden menjawab "tidak".

Tabel IV. 32

Kewenangan BPD dalam pengawasan kepada Pemerintah desa

NO	Kewenangan dalam pengawasan	F	%
1	Tidak	10	25.0
4	Ya	30	75.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No.39

Kewenangan juga diberikan kepada BPD oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan kepada Pemerintah Desa, tapi kewenangan itu hanya sebatas pengawasan terhadap jalannya Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya, terhadap masalah keuangan hanya sebatas penggunaan keuangan desa, tentang masalah detailnya keuangan desa kewenangan masih terdapat pada Badan

Pengawasan Daerah (Bawasda). Dari 40 responden, 75,0 % responden menjawab “ya”, yang artinya sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2000 memang BPD diberi wewenang dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa. Sedangkan 25,0 % responden mengatakan “tidak”, yang mereka merasakan bahwa wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah itu masih setengah-setengah. Misalnya, dalam hal pengawasan keuangan desa masih dilakukan oleh Bawasda.

Tabel IV. 33
Kewenangan dalam pembuatan peraturan-peraturan Desa

NO	Kewenangan di pembuatan Perdes	F	%
1	Tidak	10	25.0
4	Ya	30	75.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 40

Kewenangan yang lain yang dimiliki oleh BPD adalah kewenangan dalam pembuatan Peraturan-Peraturan Desa, kewenangan ini memang sepenuhnya diserahkan kepada BPD dan Pemerintah Desa dalam membuat Peraturan yang berhubungan dengan desanya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku atau Peraturan yang ada di atasnya. Hal ini memang sepenuhnya diberikan kepada BPD dan Pemerintah Desa. Walaupun demikian dari 40 responden yang menjawab “ya” ada 75,0 %, yang artinya mereka mengakui kalau mere diberi wewenang untuk membuat Perdes. Sedangkan 25,0 % responden mengatakan “tidak”, karena mereka masih merasakan belum sepenuhnya diberi wewenang untuk membuat Perdes.

Misalnya, Perdes tentang lelang bondo desa yang ketentuannya sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah dan BPD hanya menanda tangani hasil dari lelang tersebut.

2. Kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa

Tabel IV.34
Kerjasama BPD dalam pembuatan Perdes

NO	Kerja sama dl.pembuatan Perdes	F	%
1	Tidak baik	5	12.5
2	Kurang baik	23	57.5
3	Baik	12	30.0
4	Sangat baik	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 41

Kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa memang belum sepenuhnya menunjukkan adanya suatu prestasi yang menggembirakan, apalagi dalam pembuatan Peraturan-Peraturan Desa yang sarat dengan kepentingan-kepentingan. Data yang diperoleh yang diperoleh dari 40 responden di atas mengatakan bahwa 57,5 % menjawab kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam hal Pembuatan Perdes itu kurang baik, yang artinya masing-masing lembaga saling mempertahankan kepentingannya sendiri-sendiri, sehingga Perdes yang dikeluarkan sarat dengan kepentingan dan tidak berpihak pada masyarakat secara umum. Sedangkan 12,5 % responden menjawab tidak baik, yang artinya tidak ada kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa, sehingga Perdes yang dikeluarkan sering dibuat sendiri oleh Pemerintah Desa tanpa melalui persetujuan dari BPD selaku lembaga legislatif desa.

Tabel IV. 35
 Kerja sama BPD dalam Penyusunan APBDES

NO	Kerja sama dl. penyusunan APBDES	F	%
1	Tidak baik	5	12.5
2	Kurang baik	23	57.5
3	Baik	12	30.0
4	Sangat baik	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 42

Begitu halnya dengan kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDES, sama halnya dengan kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam hal pembuatan Perdes, karena penetapan APBDES merupakan salah satu bentuk dari produk Perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dengan BPD, belum juga menunjukkan kerja sama yang baik, terbukti 57,5 % responden menjawab kurang baik, yang artinya belum ada kerja sama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Dan 12,5 % responden menjawab tidak baik, karena rancangan APBDES masih dibuat sendiri oleh Pemerintah Desa tanpa dikonsultasikan dengan BPD, dan BPD hanya diajak untuk mengesahkan RAPBDES yang dibuat oleh Pemerintah Desa tersebut.

Tabel IV. 36
Kerjasama BPD dalam perencanaan pembangunan Desa

NO	Kerja sama dl. Perencanaan Pemb.desa	F	%
1	Tidak baik	5	12.5
2	Kurang baik	23	57.5
3	Baik	12	30.0
4	Sangat baik	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 43

Diantara Perdes yang lain adalah tentang perencanaan pembangunan desa, dimana kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam hal perencanaan pembangunan di desa juga masih menunjukkan belum adanya kerja sama yang baik, dari 40 responden 57,5 % menjawab kurang baik. Artinya, belum ada keselarasan antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam hal merencanakan pembangunan yang ada di desa, sehingga saling melempar tanggung jawab antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan 12,5 % responden mengatakan tidak baik. Misalnya, Pemerintah Desa membuat rencana pembangunan desa sendiri tanpa dikonsultasikan dengan BPD.

Tabel IV. 37

Kerjasama BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa

NO	Kerja sama dl. pelaksanaan Pemb.desa	F	%
1	Tidak baik	5	12.5
2	Kurang baik	23	57.5
3	Baik	12	30.0
4	Sangat baik	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 44

Dalam hal kerjasama untuk melaksanakan pembangunan di desa antara BPD dan Pemerintah Desa masih terlihat sama dengan kerja sama-kerja sama yang telah disebutkan sebelumnya, artinya dari hasil jawaban responden antara kerja sama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa jawabannya sama. Yaitu belum adanya suatu keselarasan dan kerja sama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa.

Tabel IV. 38

Kerjasama BPD dalam menggali dan mengolah potensi desa

NO	Kerja sama dl.mengolah potensi desa	F	%
1	Tidak baik	5	12.5
2	Kurang baik	23	57.5
3	Baik	12	30.0
4	Sangat baik	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 45.

Dalam hal penggalian dan pengolahan potensi yang ada di desa, kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa, belum menunjukkan kerja sama yang baik, karena belum adanya ketrampilan dan pengetahuan bagaimana cara menggali dan mengolah potensi yang ada di desa, dari 40 responden 57,5% menjawab kurang baik, artinya antara Pemerintah Desa dan BPD saling menunggu. Sedangkan 12,5 % responden menjawab tidak baik, artinya tidak ada inisiatif sama sekali dalam hal penggalian dan pengolahan potensi desa baik oleh Pemerintah Desa maupun oleh BPD.

3. Keterkaitan BPD dengan Partai Politik

Tabel IV. 39

Keterkaitan Partai Politik dalam BPD

NO	Keterkaitan Partai Politik di kebijakan	F	%
1	Sangat rendah	2	5.0
2	Rendah	10	25.0
3	Tinggi	22	55.0
4	Sangat tinggi	6	15.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 46

Keterkaitan Partai Politik dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD memang sangat sarat dengan muatan-muatan politik, karena mau tidak mau keterkaitan partai politik selalu ada pada diri anggota BPD, karena kita tahu bahwa anggota BPD itu juga sebagian besar juga berasal dari partai atau dengan kata lain mewakili partai-partai tertentu. Terbukti dari data di atas, 55,0 % responden menjawab tinggi, yang artinya setiap anggota BPD yang mewakili partai politik tertentu dalam setiap pengambilan keputusan selalu membawa misi partai yang diwakilinya. Sedangkan 5,0 % responden menjawab sangat rendah, artinya BPD tidak ada kegiatan apa-apa, sehingga tidak ada kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD.

Tabel IV. 40
Tingkat sumbang saran partai politik kepada BPD

NO	Tingkat sumbang saran Parpol	F	%
1	Sangat rendah	2	5.0
2	Rendah	14	35.0
3	Tinggi	22	55.0
4	Sangat tinggi	2	5.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 47

Begitu juga tingkat sumbang saran yang diberikan oleh partai politik kepada BPD juga tinggi sekali, karena setiap anggota BPD yang mewakili partai politik tertentu pasti setiap ada permasalahan tertentu minta pertimbangan dan saran kepada partai politik yang diwakilinya. Sebagaimana terbukti pada tabel di atas bahwa 55,0 % responden menjawab tinggi dan 5,0 % responden menjawab sangat tinggi. Artinya, setiap keputusan yang diambil oleh BPD kental dengan aroma politik yang diwakilinya.

Tabel IV. 41
Campur tangan partai politik ke dalam BPD

NO	Tingkat campur tangan parpol	F	%
1	Sangat rendah	0	0.0
2	Rendah	6	15.0
3	Tinggi	30	75.0
4	Sangat tinggi	4	10.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 48

Campur tangan partai politik kedalam BPD jelas sekali, karena BPD itu dibentuk juga berdasarkan hasil dari produk politik, sehingga campur tangan partai

politik kedalam BPD tinggi sekali. Sebagaimana yang disebutkan oleh data di atas, dari 40 responden 75,0 % menjawab tinggi dan 10,0 % responden menjawab sangat tinggi. Artinya, setiap permasalahan yang diselesaikan oleh BPD partai-partai politik yang diwakilinya selalu ikut campur tangan, sehingga keputusan yang diambil oleh BPD selalu menguntungkan dan merugikan partai tertentu, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat secara umum.

4. Kerjasama BPD dengan Lembaga-Lembaga lain di Desa

Tabel IV. 42
Tingkat dukungan LKMD kepada BPD.

NO	Tingkat dukungan LKMD	F	%
1	Sangat rendah	8	20.0
2	Rendah	28	70.0
3	Tinggi	2	5.0
4	Sangat tinggi	2	5.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 50

Kehadiran BPD memang kurang mendapat sambutan yang baik oleh lembaga-lembaga lain di desa termasuk diantaranya Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa (LKMD), berdasarkan tabel di atas 70,0 % responden mengatakan bahwa dukungan LKMD terhadap BPD masih rendah, karena LKMD menganggap bahwa kehadiran BPD di desa akan menimbulkan permasalahan baru di desa. Sedangkan 5,0% responden mengatakan tinggi dan sangat tinggi. Artinya dukungan LKMD terhadap BPD sangat besar sekali, karena LKMD merasakan bahwa kehadiran BPD

akan membantu dan meringankan tugas yang selama ini menjadi beban LKMD, seperti masalah sosial, pembangunan dan lain-lain.

Tabel IV. 43
Keaktifan lembaga-lembaga lain terhadap BPD

NO	Keaktifan lembaga lain dl. Memberi masukan kpd. BPD	F	%
1	Tidak aktif	8	20.0
2	Kurang aktif	26	65.0
3	Aktif	6	15.0
4	Sangat aktif	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No.51

Karena kehadirannya dari awal memang sudah tidak mendapat tanggapan yang positif dari lembaga-lembaga lain yang ada di desa, maka jelas sekali bahwa dalam memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan oleh BPD dari lembaga-lembaga lain yang ada di desa kurang aktif sekali, terbukti dari 40 responden 65,0 % menjawab kurang aktif. Artinya, BPD belum mendapat dukungan yang penuh dari lembaga-lembaga lain yang ada di desa, sehingga mereka tidak mau membantu memberikan masukan-masukan kepada BPD. Sedangkan 15,0 % responden menjawab aktif. Artinya, ada BPD yang sudah mendapat dukungan dari lembaga-lembaga lain yang ada di desa, sehingga setiap ada masalah mereka selalu memberikan masukan-masukan kepada BPD.

Tabel IV. 44
 Kerjasama antara BPD dengan lembaga keagamaan

NO	Kerja sama BPD dg. Lemb. Keagamaan	F	%
1	Tidak baik	2	5.0
2	Kurang Baik	20	50.0
3	Baik	16	40.0
4	Sangat baik	2	5.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 52

Lain halnya dengan lembaga keagamaan, hubungan antara BPD dengan lembaga keagamaan tidak terlalu jelek dan masing-masing desa juga bervariasi, sebagaimana jawaban dari 40 responden menyebutkan 50,0 % menjawab kurang baik. Artinya, hubungan BPD dengan lembaga keagamaan masih ada, sebab sebagian anggota BPD selain dari partai politik yang ada di desa, anggota BPD juga berasal dari tokoh-tokoh agama yang ada di desa. Bahkan 5,0 % responden mengatakan sangat baik, yang artinya hubungan antara BPD dengan lembaga keagamaan sangat harmonis, karena sebagian anggota BPD merupakan bagian dari lembaga keagamaan yang ada di desa.

Tabel IV. 45
 Kerjasama antara BPD dengan organisasi kepemudaan

NO	Kerja sama dg. organisasi kepemudaan	F	%
1	Tidak baik	4	10.0
2	Kurang Baik	24	60.0
3	Baik	12	30.0
4	Sangat baik	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 53

Berdasarkan tabel di atas kerja sama BPD dengan organisasi kepemudaan yang ada di desa 60,0 % mengatakan kurang baik. Artinya, BPD kurang mendapat dukungan dari organisasi kepemudaan, karena didalam BPD tidak ada bagian yang mengurus kepemudaan, sehingga mereka menganggap bahwa mereka tidak mempunyai wakil di BPD. Sedangkan 10,0 % responden mengatakan tidak baik, yang artinya tidak ada kerja sama sedikitpun antara BPD dengan organisasi kepemudaan.

Tabel IV. 46
Kerja sama BPD dengan organisasi wanita (PKK)

NO	Kerja sama dg organisasi kewanitaan	F	%
1	Tidak baik	4	10.0
2	Kurang baik	24	60.0
3	Baik	12	30.0
4	Sangat baik	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 54

Begitu halnya dengan kerja sama antara BPD dengan organisasi wanita (PKK) yang ada di desa juga masih kurang baik, tetapi ada juga yang kerja samanya sudah baik. Dari tabel diatas menyebutkan bahwa 60,0 % responden menjawab bahwa kerja sama antara BPD dengan PKK kurang baik, yang artinya kerja sama antara PKK dengan BPD belum terjalin dengan baik, PKK menganggap bahwa BPD tidak akan memperjuangkan PKK, karena mereka tidak mempunyai wakil perempuan di BPD. Sedangkan 10,0 % responden menjawab tidak baik. Artinya, tidak ada kerja sama antara BPD dengan PKK.

menyebutkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

C. Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian ini merupakan kesimpulan dari masing-masing variabel. Yaitu variabel pelebagaan, variabel sumber-sumber daya, variabel struktur intern, dan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan, yang masing-masing diambil dari hasil tabel tunggal yang telah disebutkan di atas.

C. 1. Variabel Pelebagaan

Tabel IV. 47

Variabel Pelebagaan

No	Kategori Jawaban	F	%
1	Sangat rendah	8	20.0
2	Rendah	29	72.5
3	Tinggi	3	7.5
4	Sangat tinggi	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : jawaban pertanyaan kuest no. 1-10

Apabila kita lihat dari tabel di atas terhadap pelebagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) ternyata (72,5 %) rendah. Artinya, bahwa pelebagaan BPD itu masih rendah, baik rendah dalam menjalankan fungsi legislasinya di desa, rendah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa, rendah dalam menyerap aspirasi masyarakat, rendah kemampuannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa, rendah kemampuannya dalam berhubungan dengan masyarakat desa, begitu halnya dengan dukungan masyarakat terhadap keberadaan BPD juga masih rendah, termasuk juga dukungan Pemerintah Daerah yang diterima oleh BPD dirasakan masih belum sepenuhnya, terbukti dari 40 responden 72,5 %

menjawab rendah, dan hanya 7,5 % responden yang menjawab tinggi. Berdasarkan data tersebut di atas membuktikan bahwa BPD di Kecamatan Sayung belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.

Indikatornya adalah:

- 1) - Masih sedikitnya perdes-perdes yang dihasilkan, bahkan ada yang belum menghasilkan satu perdespun.
- 2) - Lemahnya kontrol terhadap Pemerintah Desa, sehingga kinerja Pemerintah Desa belum terkontrol dengan baik.
- 3) - Rendahnya dukungan dari masyarakat, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang BPD.
- 4) - Rendahnya dukungan Pemerintah Daerah, baik dana maupun dukungan lainnya.

C. 2. Variabel Sumber-Sumber Daya

Tabel IV. 48

Variabel Sumber-Sumberdaya

No	Kategori Jawaban	F	%
1	Sangat rendah	8	20.0
2	Rendah	20	50.0
3	Tinggi	12	30.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : jawaban pertanyaan kuest no. 11-24

Berdasarkan data tersebut di atas membuktikan bahwa sumber-sumber daya yang ada pada BPD di Kecamatan Sayung masih rendah, dari jawaban responden diperoleh hasil 50,0 % responden menjawab rendah dan 20,0 % responden menjawab sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan formal dan informal yang dimiliki oleh BPD yang kurang mendukung terhadap tugas dan fungsinya, rendahnya kemampuan BPD dalam menyusun program kerja, rendahnya kemampuan BPD dalam merealisasikan rencana program, rendahnya dana yang diperoleh dan dimiliki oleh BPD untuk operasionalnya dalam satu tahun, dan rendahnya kualitas peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki oleh BPD sehingga dapat menghambat BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Indikatornya:

- Rendahnya sumber daya manusianya, karena kurangnya pelatihan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah terhadap pelembagaan BPD
- Rendahnya sumber dana BPD yang hanya mengandalkan dari hasil lelang bondo desanya
- Kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh BPD, baik kantornya maupun peralatan penunjangnya.

C. 3. Variabel Struktur Intern

Struktur intern adalah struktur yang ada di dalam organisasi yang berkaitan dengan pembagian tugas dan fungsi.

Tabel IV. 49
Struktur Variabel Struktur Intern

No	Kategori Jawaban	Frek	%
1	Sangat rendah	5	12.5
2	Rendah	23	57.5
3	Tinggi	12	30.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
	Total	40	100.0

Sumber : jawaban pertanyaan kuest no. 25-36

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa struktur intern yang ada pada BPD itu masih rendah, hal ini terbukti 57,5 % responden diantaranya menjawab rendah dan 12,5 % responden menjawab sangat rendah.

Rendahnya struktur intern ini dapat kita lihat dari:

- Pembagian kerja bagi anggota BPD yang kurang jelas,
- kurang sesuainya pembagian kerja dengan ketrampilan yang dimiliki oleh anggota BPD,
- kurang sesuainya jumlah anggota BPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya,
- sangat beragamnya pekerjaan yang harus ditangani,
- tidak adanya wewenang dari pimpinan kepada anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
- masih rendahnya partisipasi anggota BPD dalam pengambilan keputusan.

Karena belum adanya penataan yang baik terhadap struktur intern yang ada pada BPD di Kecamatan Sayung, sehingga tugas dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh BPD tidak dapat terealisasi dengan baik.

C. 4. Variabel Kaitan-Kaitan Yang Memungkinkan (*enabling*)

Tabel IV. 50
Variabel Kaitan-Kaitan yang Memungkinkan

No	Kategori Jawaban	Frek	%
1	Sangat rendah	1	2.5
2	Rendah	11	27.5
3	Tinggi	20	50.0
4	Sangat tinggi	8	20.0
	Total	40	100.0

Sumber : jawaban pertanyaan kuest no. 37-54.

Variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) dapat disimpulkan tinggi yaitu 50,0 % responden menjawab tinggi dan 20,0 % responden menjawab sangat tinggi, sedangkan yang menjawab rendah yaitu 27,5 % yang dapat mengakibatkan pelembagaan BPD tidak berfungsi secara efektif.

Hal ini dapat kita lihat dari:

- Tingginya campur tangan Pemerintah Daerah baik dalam pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa maupun pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa.

- Tingginya keterkaitan Pemerintah Daerah terhadap pembuatan Peraturan-Peraturan Desa (Perdes).

- Tingginya keterkaitan Partai Politik dalam setiap kebijakan yang diambil oleh BPD,
- Tingginya campur tangan partai politik dalam masalah-masalah yang ada pada BPD,
- Dan besarnya pengaruh lembaga-lembaga lain yang ada di desa.

Dengan tingginya pengaruh lembaga-lembaga lain terhadap BPD baik lembaga yang ada di atasnya (Pemerintah Daerah), maupun lembaga yang ada di desa, maka akan membuat pelembagaan BPD tidak akan berfungsi secara efektif. Dengan kata lain, semakin tinggi pengaruh kaitan-kaitan terhadap BPD, maka akan semakin rendah lembaga itu untuk berfungsi (semakin rendah kemandiriannya).

C. 5: Korelasi antara Sumber-Sumber Daya dengan Pelembagaan BPD

Tabel IV. 51

Pengaruh Sumber-Sumberdaya terhadap Pelembagaan

X	Y	Sumber-sumberdaya				Total
		1 Rendah	2 Kurang tinggi	3 Tinggi	4 Sangat tinggi	
Pelembagaan	1 Rendah	4	4			8
		50.0%	20.0%			20.0%
	2 Kurang tinggi	4	16	9		29
		50.0%	80.0%	75.0%		72.5%
	3 Tinggi			3		3
				25.0%		7.5%
	4 Sangat tinggi				0	0
					100.0%	0.0%
Total		8	20	12	0	40
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber : Kuest dari variabel Sumber-Sumberdaya dengan variabel Pelembagaan

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel di atas menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara sumber-sumber daya dengan pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD), artinya semakin tinggi sumber-sumber daya yang ada pada Badan Perwakilan Desa (BPD), maka semakin berfungsinya efektifitas pelembagaan

Badan Perwakilan Desa (BPD) tersebut; begitu sebaliknya semakin rendah sumber-sumber daya yang ada pada Badan Perwakilan Desa (BPD), maka akan semakin tidak berfungsinya pelebagaan BPD tersebut. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil perhitungan kendall dengan angka sebesar 0,495 pada tabel IV. 51 dibawah, artinya adanya pengaruh positif yang cukup kuat antara sumber-sumber daya dengan pelebagaan BPD. Apabila kita lihat dengan taraf kepercayaan 5 % ternyata hasil Kendall tersebut dapat dikatakan signifikan dimana $0,000 < 0,05$.

Tabel IV. 52

Korelasi antara sumber-sumberdaya dengan Pelebagaan BPD

Symmetric Measures					
		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.495	.096	3.758	.000
	Spearman Correlation	.525	.100	3.800	.001(c)
Interval by Interval	Pearson's R	.526	.100	3.812	.000(c)
N of Valid Cases		40			

C. 6. Korelasi antara Struktur Intern dengan Pelembagaan BPD

Analisis korelasi antara variabel Struktur Intern dengan variabel Pelembagaan BPD.

Tabel IV. 53 Pengaruh Struktur Intern terhadap Pelembagaan

X	Y	Struktur Intern				Total
		1 Rendah	2 Kurang tinggi	3 Tinggi	4 Sangat tinggi	
Pelembagaan	1 Rendah	5	3			8
		100.0%	13.0%			20.0%
	2 Kurang tinggi		20	9		29
			87.0%	75.0%		72.5%
	3 Tinggi					3
						7.5%
	4 Sangat tinggi				0	0
				25.0%	100.0%	0.0%
Total		5	23	12	0	40
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber : Variabel Struktur Intern dengan variabel Pelembagaan

Struktur Intern sangat berpengaruh sekali terhadap berfungsinya pelembagaan BPD. Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas ternyata struktur intern mempunyai pengaruh yang positif dengan pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD). Artinya semakin jelas pembagian kerja para anggota BPD dan semakin jelas tugas dan fungsi mereka, maka akan semakin baik pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD),

begitu sebaliknya. Dari hasil perhitungan Kendall seperti yang disebutkan pada tabel IV. 53 dibawah menunjukkan angka sebesar 0,651 yang artinya ada pengaruh yang kuat antara struktur intern dengan pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD). Dan apabila kita lihat dengan taraf signifikan 5 % ternyata hasil Kendall tersebut dikatakan signifikan, karena $0,000 < 0,05$.

Tabel IV. 54

Korelasi antara Struktur Intern dengan Pelembagaan BPD

Symmetric Measures					
		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.651	.075	4.521	.000
	Spearman Correlation	.675	.080	5.637	.000(c)
Interval by Interval	Pearson's R	.694	.070	5.938	.000(c)
N of Valid Cases		40			

C. 7. Korelasi antara Kaitan-Kaitan Yang Memungkinkan (*enabling*) dengan Pelembagaan BPD

Tabel IV. 55
Pengaruh Kaitan-kaitan yang memungkinkan terhadap Pelembagaan

X	Y	Kaitan-kaitan YM				Total
		1 Rendah	2 Kurang tinggi	3 Tinggi	4 Sangat tinggi	
Pelembagaan	1 Rendah	1 100.0%	7 63.6%			8 20.0%
	2 Kurang tinggi		4 36.4%	17 85.0%	8 100.0%	29 72.5%
	3 Tinggi			3 15.0%		3 7.5%
	4 Sangat tinggi					
Total		1 100.0%	11 100.0%	20 100.0%	8 100.0%	40 100.0%

Sumber : variabel Kaitan-kaitan yang Memungkinkan dengan Pelembagaan

Pengaruh kaitan-kaitan yang memungkinkan terhadap pelembagaan sangat berpengaruh sekali, berdasarkan hasil tabel di atas bahwa variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD). Artinya, semakin keterkaitan pengaruh lembaga-lembaga lain ke dalam BPD, maka akan semakin rendah pelembagaan BPD, sebab

keterkaitan lembaga lain kedalam BPD tersebut bukan merupakan dukungan kepada BPD melainkan ikut campur kedalam lembaga tersebut. Pengaruh kaitan-kaitan yang memungkinkan terhadap pelebagaan BPD di Kecamatan Sayung bila dilihat dari hasil perhitungan Kendall sebesar 0,518 yang artinya ada pengaruh yang cukup kuat antara kaitan-kaitan yang memungkinkan dengan pelebagaan BPD. Apabila dilihat dengan taraf signifikansi 5 %, maka pengaruh tersebut dapat dikatakan signifikan karena $0,000 < 0,05$.

Tabel IV. 56

Korelasi antara Kaitan-Kaitan Yang Memungkinkan dengan Pelebagaan BPD

Symmetric Measures					
		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.518	.105	3.791	.000
	Spearman Correlation	.575	.112	4.335	.000(c)
Interval by Interval	Pearson's R	.550	.091	4.056	.000(c)
N of Valid Cases		40			

C. 8. PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sumber-sumberdaya terhadap pelembagaan BPD, pengaruh struktur intern terhadap pelembagaan BPD, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) terhadap pelembagaan BPD.

Adapun hasil pengujian hipotesis tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 8.1. Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil Pengujian	Keputusan	Keterangan
1	Sumber-sumberdaya berpengaruh signifikan terhadap pelembagaan BPD	0,000	Ya	Signifikan
2	Struktur intern berpengaruh signifikan terhadap pelembagaan BPD	0,000	Ya	Signifikan
3	Kaitan-kaitan yang memungkinkan berpengaruh signifikan terhadap pelembagaan BPD	0,000	Ya	Signifikan

Tabel IV. 57

Korelasi antara variabel sumber-sumberdaya, struktur intern, dan kaitan-kaitan yang memungkinkan dengan pelebagaan BPD

		Correlations				
		Pelebagaan	Sumber-Sumberdaya	Struktur Intern	Kaitan2 yg memungkinkan	
Kendall's tau_b	Pelebagaan	Correlation Coefficient	1.000	.495(**)	.651(**)	.518(**)
		Sig. (2-tailed)		.001	.000	.000
		N	40	40	40	40
	Sumber-Sumberdaya	Correlation Coefficient	.495(**)	1.000	.677(**)	.570(**)
		Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000
		N	40	40	40	40
	Struktur Intern	Correlation Coefficient	.651(**)	.677(**)	1.000	.634(**)
		Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
		N	40	40	40	40
	Kaitan-kaitan yg memungkinkan	Correlation Coefficient	.518(**)	.570(**)	.634(**)	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
		N	40	40	40	40

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa semua variabel independen, baik variabel sumber-sumber daya (X1), variabel struktur intern (X2),

dan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pelebagaan (Y); atau sumber-sumberdaya mempunyai pengaruh yang positif terhadap pelebagaan BPD dengan angka sebesar 0,495, dan struktur intern mempunyai pengaruh yang positif terhadap pelebagaan BPD dengan angka sebesar 0,651, sedangkan kaitan-kaitan yang memungkinkan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pelebagaan BPD dengan angka 0,518. Dengan pengtesan signifikansi 5 %, maka semuanya signifikan, karena $\text{approx sig. } 0,000 < 0,05$ dan $\text{approx sig. } 0,001 < 0,05$. artinya hipotesa Nol yang mengatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel sumber-sumber daya (X1), variabel struktur intern (X2), dan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (X3) terhadap pelebagaan BPD (Y) ditolak. Karena ketiga variabel dalam penelitian ini semuanya mempunyai pengaruh signifikan.

Untuk pengaruh bersama-sama antara variabel sumber-sumber daya (X1), variabel struktur intern (X2), dan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (X3) terhadap pelebagaan BPD (Y) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 58

Korelasi antara sumber-sumberdaya, struktur intern dan kaitan-kaitan yang memungkinkan terhadap pelebagaan BPD

Test Statistics	
N	40
Kendall's W(a)	.543
Chi-Square	65.139
Df	3
Asymp. Sig.	.000
a Kendall's Coefficient of Concordance	

Berdasarkan perhitungan korelasi Rank Kendall's maka secara bersama-sama variabel sumber-sumberdaya (X1), variabel struktur intern (X2), dan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (X3) terhadap pelebagaan Badan Perwakilan Desa (Y) diperoleh hasil sebesar 0,543 artinya ada pengaruh yang cukup kuat, karena hasil korelasi 0,543 diatas 0,5.

D. DISKUSI

Berdasarkan teori pembangunan lembaga yang disampaikan oleh Milton J. Esman pada bagian tinjauan pustaka di depan, peneliti menyimpulkan bahwa pelebagaan Badan Perwakilan Desa di Kecamatan Sayung terhenti pada saat lembaga tersebut setelah dibentuk (direalisasikan), artinya lembaga BPD setelah dibentuk belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai lembaga legislatif desa, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat

berfungsinya lembaga BPD di Kecamatan Sayung, baik dari dalam lembaga itu sendiri maupun dari luar lembaga.

Menurut Milton J. Esman dan Saul M. Katz bahwa faktor yang mempengaruhi pelebagaan adalah kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumberdaya, struktur intern, kaitan-kaitan yang memungkinkan, fungsional, normatif, kaitan tersebar juga termasuk transaksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelebagaan diatas bila peneliti kaitkan dengan permasalahan yang timbul pada Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kecamatan Sayung, maka variabel yang mempengaruhi pelebagaan BPD di Kecamatan Sayung adalah variabel sumber-sumberdaya, struktur intern dan kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*). Setelah ketiga variabel tersebut peneliti buktikan di lapangan dan peneliti uji dengan rumus-rumus yang sesuai yaitu Rank Kendall's maka hasilnya adalah semua variabel independen yaitu sumber-sumberdaya, struktur intern dan kaitan-kaitan yang memungkinkan berpengaruh terhadap pelebagaan Badan Perwakilan Desa (BPD), yang hasilnya adalah bahwa variabel sumber-sumberdaya (X1), struktur intern (X2), mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan kaitan-kaitan yang memungkinkan (X3) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pelebagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kecamatan Sayung (Y). Atau sumber-sumberdaya mempunyai pengaruh yang positif dan cukup kuat dengan angka korelasi Rank Kendall's sebesar 0,495. Dan struktur intern mempunyai pengaruh yang positif dan kuat dengan angka sebesar 0,651, sedangkan kaitan-kaitan yang memungkinkan mempunyai hubungan yang negatif dan cukup kuat juga dengan

angka sebesar 0,518. Dengan pengujian signifikansi 5 % maka semuanya signifikan. Karena diperoleh $\text{Approx Sig. } 0,000 < 0,05$ dan $\text{Approx Sig } 0,001 < 0,05$. Artinya hipotesis Nol yang mengatakan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y ditolak. Berarti ketiga variabel independen dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Setelah dihitung dengan korelasi W maka korelasi bersama-sama dapat diperoleh hasil sebesar 0,543 yang artinya ada pengaruh yang positif dan cukup kuat, karena hasil tersebut diatas 0,5.

Dengan demikian berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Milton J. Esman dan Saul M. Katz, riset di lapangan dan pengolahan data melalui uji statistik dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi pelebagaan Badan Perwakilan Desa di Kecamatan Sayung adalah variabel sumber-sumber daya, variabel struktur intern dan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*).

Dengan kata lain :

- Semakin tersedianya sumber-sumber daya yang cukup, baik sumber dana, sumber daya manusia, maupun sumber-sumber yang lain yang ada pada BPD di Kecamatan Sayung, maka pelebagaan BPD di Kecamatan Sayung akan semakin berfungsi.
- Begitu juga dengan struktur intern, baik dalam hal pembagian kerja, kejelasan tugas bagi anggotanya, maupun wewenang kepada anggota BPD, maka fungsi-fungsi yang ada pada BPD akan dapat dijalankan dengan baik.

Ditambah lagi dengan kerja sama yang baik antara BPD dengan lembaga-lembaga lain, baik yang ada di atasnya (Pemerintah Daerah) maupun dengan lembaga-lembaga yang ada di desa (LKMD, Pemerintah Desa, lembaga keagamaan, dll) akan membuat BPD di Kecamatan Sayung akan berfungsi dengan efektif.

Bila kondisi tersebut bertahan dan berkelanjutan, maka implikasinya terhadap pelembagaan Badan Perwakilan Desa di Kecamatan Sayung dan masyarakat pada umumnya adalah :

- a. Tujuan dari pembentukan lembaga Badan Perwakilan Desa tidak akan tercapai dengan baik.
- b. Fungsi-fungsi yang ada pada BPD tidak akan berjalan dengan baik, apa itu fungsi legislasinya atau fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
- c. Beban Pemerintah Desa akan semakin berat, karena harus menanggung dana untuk BPD setiap tahunnya.
- d. Akan menimbulkan permasalahan dan konflik baru di desa, dan masyarakatlah yang menanggung akibatnya.
- e. Pembangunan di desa semakin tidak menentu dan tak terarah, karena masing-masing lembaga saling melempar tanggung jawab, baik dari Pemerintah Desanya maupun dari BPD-nya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan oleh peneliti di muka, dapat diambil beberapa hal sebagai kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung, pada tahap setelah dibentuk belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, bahkan ada yang tidak berfungsi sama sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sumber-sumberdaya, faktor struktur intern, dan faktor kaitan dengan lembaga lain.

2. Sumber-sumberdaya yang ada pada BPD yang ada di Kecamatan Sayung masih rendah. Baik sumber daya manusia (SDM), sumber dana yang dimiliki oleh BPD, juga kondisi fisik yang dimilikinya.

3. Struktur Intern yang ada pada BPD di Kecamatan Sayung belum tertata dengan baik. Misalnya, kurang jelasnya tugas yang harus mereka laksanakan, kurang sesuai pembagian kerja dengan ketrampilan yang dimiliki oleh anggota BPD, dan kurangnya wewenang anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Keterkaitan lembaga-lembaga lain terhadap BPD di Kecamatan Sayung sangat tinggi, baik lembaga yang ada di atasnya (Pemerintah Daerah), maupun

lembaga yang ada di desa, sehingga menyebabkan BPD tidak dapat berfungsi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, bersama ini direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan tentang BPD perlu mencarikan pemecahannya, agar pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung dapat berfungsi dengan baik.
2. Perlu adanya peningkatan sumber-sumber daya BPD, baik sumber dana, sumber daya manusianya (SDM), maupun kondisi fisik yang dimiliki BPD.
3. Perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang rinci dari Pemerintah Daerah kepada BPD, agar anggota BPD mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai lembaga legislatif desa.

Berdasarkan beberapa saran-saran tersebut di atas, maka peneliti merekomendasikan alternatif pelembagaan BPD, yaitu sebaiknya lembaga BPD perlu dirancang ulang lagi sebagai lembaga formal yang berada dibawah langsung Pemerintah Daerah, sehingga semua keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh BPD ditanggung oleh daerah dan dimasukkan dalam anggaran daerah, dan bukan ditanggung oleh desa, karena BPD merupakan wakil dari Pemerintah Daerah yang berada di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam I. Indrawijaya, 1983, *Perubahan dan pengembangan Organisasi*, Sinar Baru, Bandung.
- Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Demak, 2002, *Eksistensi dan Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Peraturan-Peraturan Desa*, Pemda Demak.
- Dessler Gery, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (edisi Bahasa Indonesia), Prenhallindo, Jakarta.
- Hasibuan Malayu. SP, 1999, *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hersey Paul dan Ken Blanchard, 1995, *Manajemen Perilaku Organisasi (Pendayagunaan Sumber Daya Manusia)*, Erlangga, Jakarta.
- James L. Gibson, dkk, 1992, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku – Struktur – Proses)*, Erlangga, Jakarta.
- Nasution. S, 2000, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Robbin Sthephen. P, 1996, *Perilaku Organisasi (Edisi Indonesia)*, Prenhallindo, Jakarta.
- Setia Tunggal Hadi, 1999, *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah*, Harvarindo, Jakarta.

THE HISTORY OF THE

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

- Simamora Henry, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi kedua)*, STIE YKPN, Jakarta.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tijan, 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*, Fisipol – Unes, Semarang.
- Umar Husein, 1998, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Gramedia, Jakarta.
- Umar Husein, 2001, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman Husein, dkk, 2000, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- W. Eaton Joseph, 1996, *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi (Penerjemah Pandan Guntoro dan Alsi Jani)*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Winarno Budi, 1989, *Teori Kebijakan Publik*, Gajahmada Press, Yogyakarta.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.